

API DALAM SEKAM

Keberagamaan Generasi Z



Enhancing the Role of Religious Education in
Countering Violent Extremism in Indonesia

Gedung PPIM UIN Jakarta,
Jalan Kertamukti No. 5, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten 15419 Indonesia
Tel: +62 21 7499272 | Fax: +62 21 7408633 | E-mail: pmu.convey@gmail.com | Website: <https://conveyindonesia.com>

Collaborative Program of:



Empowered lives.
Resilient nations.

Survei Nasional:
Sikap dan Perilaku Keberagamaan di Sekolah dan Universitas

PPIM UIN Jakarta – UNDP Indonesia

API DALAM SEKAM: Keberagamaan Generasi Z

**Survei Nasional:
Sikap dan Perilaku Keberagamaan di Sekolah dan Universitas**

PPIM UIN Jakarta – UNDP Indonesia

CONVEY REPORT

Api Dalam Sekam: Keberagamaan Generasi Z

Vol. 1 | No. 1 | Tahun 2018

Penanggung Jawab:

PPIM UIN Jakarta; UNDP Indonesia

Penulis: Rangga Eka Saputra

Peneliti: Yunita Faela Nisa, Laifa Annisa Hendarmin, Erita Narhetali, Debbie Affianty Lubis, Salamah Agung, Tati Rohayati, M. Zaki Mubarak, Agung Priyo Utomo, Rangga Eka Saputra, Bambang Ruswandi, Dwirifqi Kharisma Putra, dan Dirga Maulana

Editor: Endi Aulia Garadian

Tata Letak: Endi Aulia Garadian

Penerbit:

Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta

Jl. Kertamukti No.5

Pisangan Barat, Ciputat Timur

Tangerang Selatan, Banten

Telepon: +62-21 7499272, 7423543

Email: ppim@uinjkt.ac.id

Website: ppim.uinjkt.ac.id

KATA PENGANTAR

CONVEY REPORT ini ditulis dalam rangka memberikan gambaran singkat kepada khalayak luas mengenai temuan-temuan riset PPIM UIN Jakarta yang bertajuk *Survei Nasional: Sikap dan Perilaku Keberagamaan di Sekolah dan Universitas*. Survei mengkaji secara mendalam dan komprehensif tentang kondisi sikap dan perilaku keberagaman siswa dan mahasiswa saat ini. Hal tersebut penting karena di saat yang bersamaan, sedang terjadi penguatan arus radikalisme dan intoleransi di tengah masyarakat Indonesia, termasuk di sekolah dan universitas.

Studi tersebut merupakan bagian dari Program CONVEY Indonesia yang digagas oleh PPIM UIN Jakarta bekerjasama dengan United Nations Development Program (UNDP) Indonesia. Untuk itu, mewakili para peneliti survei ini, saya mengucapkan terima kasih kepada tim PPIM UIN Jakarta dan UNDP Indonesia yang telah memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan survei ini.

Lebih khusus ucapan terima kasih disampaikan kepada kepada para peneliti senior PPIM, Prof. Jamhari Makruf, Pak Saiful Umam, Fuad Jabali, Ismatu Ropi, Jajang Jahroni, Ali Munhanif, dan Dadi Darmadi, yang telah mengawal survei ini mulai dari pembuatan instrumen survei, pengambilan data, penulisan laporan, sampai pada diseminasi hasil penelitian. Selanjutnya terima kasih pula kepada Bapak Didin Syafruddin, Din Wahid, dan Ibu Yunita Faela Nisa yang telah membaca dengan teliti dan memberi masukan terhadap naskah CONVEY REPORT ini.

Terakhir, apresiasi mendalam juga saya sampaikan kepada para peneliti yang telah bekerja keras mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran selama hampir enam bulan untuk riset ini. Tidak lupa ucapan terima kasih juga diberikan kepada para peneliti lokal yang sudah berjuang terutama dalam pengambilan data. Sungguh tidak mudah menjangkau responden di daerah terpencil di negara kepulauan seperti Indonesia. Bahkan ada yang sampai harus menyeberang sungai di pedalaman Kalimantan di mana banyak terdapat buaya. CONVEY REPORT ini ada atas kerja heroik mereka.

Yogyakarta, 23 Maret 2018
Rangga Eka Saputra

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF, 1

REKOMENDASI, 3

I LATAR BELAKANG, 5

II FOKUS KAJIAN DAN METODOLOGI, 9

III LEVEL INTOLERANSI DAN RADIKALISME SISWA DAN MAHASISWA, 10

Faktor Pendorong Radikalisme dan Intoleransi, 13

- Guru dan Model Pembelajaran PAI, 13
- Akses Internet untuk Sumber Pengetahuan Agama, 14
- Persepsi tentang Islamisme dan Kinerja Pemerintah, 15

IV PERAN FAKTOR PERSONAL, 16

Latar Belakang Demografi, 16

- Jenis Kelamin, 16
- Status Sosial Ekonomi, 18
- Latar Belakang Pesantren, 20
- Induk Kementeriaan, 22

Makna Hidup, Relijiusitas, dan Perasaan Terancam, 24

- Makna Hidup, 25
- Persepsi Relijiusitas, 26
- Perasaan Terancam, 26

V PERAN FAKTOR LINGKUNGAN, 27

Kedekatan dengan Ormas Keagamaan, 27

Internet dan Media Sosial, 31

Persepsi terhadap Kinerja Pemerintah dan demokrasi, 34
Islamisme, 37

VI MODEL PENDIDIKAN YANG MENG-COUNTER INTOLERANSI DAN RADIKALISME, 42

VII KESIMPULAN, 43

PROFIL PENULIS, 45

PROFIL LEMBAGA, 45

DAFTAR PUSTAKA, 46

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pasca reformasi, yang ditandai dengan keterbukaan struktur kesempatan politik, gerakan radikalisme dan ekstremisme berkembang pesat di Indonesia, salah satunya masuk di dalam institusi pendidikan. Beberapa studi sudah mengkonfirmasi perkembangan tersebut. Paham dan gerakan radikalisme masuk ke sekolah dan universitas melalui berbagai celah seperti: kegiatan ekstrakurikuler keagamaan (Wahid Foundation, 2016; Salim HS dkk, 2011), guru yang berpandangan radikal (PPIM, 2016), alumni yang berafiliasi dengan gerakan radikal (Masooda dkk, 2016), sampai pada materi dalam buku ajar PAI yang mengandung muatan radikal dan eksklusif (PPIM, 2016).

Merespons kondisi tersebut, survei ini mengkaji sikap dan perilaku keberagaman siswa dan mahasiswa serta faktor-faktor yang ikut mempengaruhinya. Tujuan dari studi ini adalah ingin melihat lebih mendalam dan komprehensif tingkat radikalisme dan intoleransi siswa dan mahasiswa Muslim saat ini. Beberapa tema yang dijadikan variabel yang mempengaruhi tingkat radikalisme dan intoleransi diklasifikasi menjadi dua level. *Pertama*, level personal seperti: demografi, makna hidup, dan relijiusitas. *Kedua*, level lingkungan meliputi: kedekatan dengan ormas, keluarga, internet/media sosial, Islamisme, dan kinerja pemerintah. Pengambilan data dilakukan pada 1 September sampai 7 Oktober 2017.

Temuan utama penelitian ini memperlihatkan bahwa pada level sikap/opini siswa dan mahasiswa memiliki pandangan keagamaan yang cenderung radikal (58,5%) dan intoleran (51,1% intoleransi internal, dan 34,3% intoleransi eksternal). Sementara pada level perilaku/aksi, sebagian besar mereka berperilaku moderat (74,2%). Namun ada perbedaan signifikan dalam hal perilaku toleransi, mereka cenderung lebih toleran secara eksternal (62,9%) daripada secara internal (33,2%). Artinya siswa dan mahasiswa lebih toleran terhadap pemeluk agama lain ketimbang terhadap perbedaan di dalam umat Islam, terutama terhadap kelompok, aliran, atau paham yang dianggap menyimpang atau sesat. Faktor yang berpengaruh terhadap sikap intoleran adalah ketika perbedaan internal umat Islam itu diasosiasikan dengan Ahmadiyah dan Syiah.

Terdapat tiga faktor utama pendorong radikalisme dan intoleransi. *Pertama*, guru dan model pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Siswa dan mahasiswa mengakui bahwa pelajaran Pendidikan Agama Islam berpengaruh besar terhadap mereka untuk tidak bergaul dengan pemeluk agama lain (48,9%). Mereka juga tidak setuju jika tujuan PAI adalah untuk bersikap toleran dan berbuat baik kepada pemeluk Ahmadiyah (13,18%) dan Syiah (14,47%). Siswa dan mahasiswa juga menyatakan bahwa materi PAI yang mereka terima lebih banyak menekankan pada aspek keimanan, ketakwaan dan ibadah (63,47%). Sementara materi yang memuat pelajaran tentang toleransi dan keberagaman hanya mendapat porsi yang sedikit dalam PAI.

Kedua, survei nasional menemukan bahwa akses internet adalah faktor penyumbang radikalisme dan intoleransi. Internet sekarang ini merupakan sumber pengetahuan agama yang utama bagi siswa dan mahasiswa (50,89%). Siswa dan mahasiswa yang mengakses internet untuk memperoleh pengetahuan agama cenderung intoleran dan radikal karena mereka mengakses website dan ustadz yang masuk dalam kategori radikal sebagai alternatif dalam memperoleh pengetahuan keagamaan (59,5%). Faktor *ketiga* penyumbang radikalisme dan intoleransi adalah persepsi tentang Islamisme dan kinerja pemerintah. Walaupun evaluasi mereka terhadap kinerja pemerintah dalam hal ekonomi dan penegakan hukum cenderung negatif, namun kepercayaan dan loyalitas mereka terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan demokrasi tetap tinggi; 80,74% mereka menolak pernyataan bahwa pemerintah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah *thaghut* atau kafir. Anehnya, aspirasi mereka terhadap penerapan syariat Islam dan kekhalifahan sebagai sistem pemerintahan juga cukup tinggi (91,23%).

Studi ini juga menemukan bahwa masih ada peluang dan potensi dalam upaya menangkal radikalisme dan intoleransi melalui Pendidikan Agama Islam. Mayoritas siswa dan mahasiswa setuju jika pembelajaran agama Islam memuat pembahasan tentang permasalahan bersama dari sudut pandang agama lain (70,75%), bertukar pikiran tentang pengalaman beragama antar siswa dan mahasiswa yang berbeda agama (79,12%), diskusi tentang perbedaan untuk mengurangi prasangka negatif antar kelompok

agama (89,24%), dan menghargai kebudayaan lokal (67,56%). Untuk itu, kesempatan guru mengajarkan tentang keberagaman, kerja sama antar kelompok yang berbeda, serta mengurangi prasangka negatif terhadap kelompok agama lain sejatinya terbuka di dalam kelas. Selain itu, kurikulum PAI yang menekankan toleransi dan pemikiran Islam moderat sangat diperlukan dalam menangkal radikalisme dan intoleransi.

REKOMENDASI

1. Pengenalan studi-studi agama dan kepercayaan perlu diintegrasikan dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam.
 - Terkait materi: Dalam pengajaran PAI, perlu mengembangkan literasi keagamaan (*religious literacy*) dan pendidikan lintas iman (*interfaith education*).
 - Perlu memberikan banyak praktik pengalaman keberagaman dan pengalaman mengatasi masalah bersama antar siswa lintas iman, seperti siswa-siswi yang berbeda agama bisa menceritakan pengalaman mereka merayakan hari besar agamanya, dan berbagi kisah tentang nilai-nilai agama yang menjunjung harkat kemanusiaan.
 - Penggunaan berbagai macam metode pendidikan yang lebih interaktif dan sesuai dengan karakter pembelajar generasi Milenial, seperti audio visual, infografis dan media sosial.
 - Reformasi rekrutmen, pendidikan dan pelatihan Guru Agama Islam.
2. Negara berkewajiban mengembangkan pendidikan keagamaan yang terbuka, toleran dan inklusif. Langkah yang bisa dilakukan adalah mempertegas dan memperdalam materi toleransi dalam buku ajar PAI. Selain itu untuk memastikan buku ajar PAI tidak tersusupi ideologi radikalisme dan intoleransi, dibutuhkan lajnah pentashih buku ajar PAI. Institusi ini memiliki otoritas untuk mengawasi proses pembuatan dan penerbitan buku PAI. Tujuannya untuk memastikan agar buku ajar PAI bebas dari muatan radikal dan intoleran, serta sejalan dengan nilai-nilai kewargaan dan kebangsaan.

3. Pemerintah membuka peluang lebih besar pada guru-guru untuk mengikuti pelatihan tentang wawasan kebangsaan, keislaman dan keindonesiaan dalam sebuah program yang sistematis. Pelatihan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kapasitas guru dan dosen dalam menyampaikan materi toleransi dan keberagaman. Pelatihan ini juga diharapkan menumbuhkan kesadaran guru bahwa tujuan PAI tidak hanya mendidik siswa agar taat beragama, tapi juga menyiapkan siswa agar menjadi warga negara yang baik, yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai kewargaan (toleransi, keberagaman, dan kebebasan) dan kebangsaan (NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan demokrasi).
4. Pemerintah perlu melakukan literasi media, khususnya media sosial di tingkat sekolah dan universitas, meliputi: pembelajaran *cross-check* terhadap pemberitaan *hoax*, menyebarkan konten positif di media sosial, dan mengedepankan sikap kritis dalam menyaring dan memproduksi konten. Narasi alternatif yang sesuai dengan karakteristik generasi Milenial perlu diperbanyak, misalnya dengan memproduksi dan mengampanyekan konten-konten yang mendorong nilai-nilai toleransi, keberagaman dan perdamaian di sekolah dan universitas.
5. Ormas Islam *mainstream* seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah perlu lebih aktif memproduksi dan mengampanyekan konten-konten Islami yang memuat pesan perdamaian dan nilai-nilai toleransi dengan kemasan yang lebih populer.

I. LATAR BELAKANG

Di Indonesia, Islam dan pendidikan merupakan dua hal yang tak terpisahkan. Memisahkan keduanya, setidaknya untuk saat ini, merupakan suatu yang mustahil. Hal itu dikarenakan pendidikan Islam mempunyai sejarah panjang dan telah melekat bagi bangsa Indonesia.¹ Pancasila, sebagai dasar negara, memberi ruang akomodasi bagi agama untuk masuk dan menjadi bagian penting dari kehidupan bernegara, sebagaimana tertuang dalam sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa". Hal ini menjadi konsensus kebangsaan Indonesia yang disebut Jeremy Menchik (2017) sebagai nasionalisme bertuhan (*Godly Nationalism*). Agama, dalam batas-batas tertentu, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kebangsaan.²

Konsensus kebangsaan yang demikian juga tercermin dalam pelaksanaan pendidikan Islam yang bahkan sudah mulai terlembagakan sejak periode awal kemerdekaan. Pada tahun 1946, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) mengharuskan pendidikan agama menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional dan masuk dalam kurikulum nasional.³ Campur tangan negara dalam pendidikan Islam juga nampak dari wewenang Kementerian Agama untuk melakukan birokratisasi pendidikan agama melalui Undang-Undang Pendidikan No. 4 tahun 1950.⁴

Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, kajian terhadap pendidikan Islam di Indonesia telah banyak menarik minat para sarjana. Kajian-kajian tentang pendidikan Islam pada mulanya banyak menaruh perhatian pada model tradisional pendidikan Islam, khususnya pesantren dan madrasah.⁵ Belakangan juga muncul studi

¹ Elihami (2016). "The Challenge of Religious Education in Indonesia Multiculturalism." *Journal of Education and Human Development Vol. 5, No.4, pp.211-221*.

² Lebih jauh tentang konsep *Godly Nationalism*, lihat bab 4 pada studi Jeremy Menchik (2017). "Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance without Liberalism." New York: Cambridge University Press.

³ *Ibid.* Elihami.

⁴ Lihat Ismatu Ropi (2017). "Religion and Regulation in Indonesia." Singapore: Springer.

⁵ Beberapa studi tentang pendidikan Islam model pesantren dan madrasah di Indonesia, lihat Bianca J. Smith dan Mark Woodward (ed.) (2014). "Gender and Power in Indonesian Islam: Leaders, Feminists, Sufis and *Pesantren* Selves." New York: Routledge; Azyumardi Azra, Dina Afrianty, dan Robert W. Hefner (2010). "Pesantren and Madrasa: Muslim Schools and National Ideals in Indonesia" dalam Robert W. Hefner & Muhammad Qasim Zaman (eds.) "Schooling Islam: The Culture and Politics of Modern Muslim Education". Princeton: Princeton University Press; Dindin

yang cukup komprehensif mengenai pendidikan tinggi Islam (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, PTKI).⁶ Institusi-institusi pendidikan model ini dianggap mewakili fakta berakarnya pendidikan Islam di masyarakat Muslim Indonesia.

Fakta tersebut juga terbukti dengan banyaknya organisasi-organisasi Islam di Indonesia yang mempunyai lembaga pendidikan, setidaknya sebagai wadah bagi para anggotanya. Lembaga pendidikan Islam tidak hanya dimiliki oleh organisasi Islam *mainstream* terbesar, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, dan tidak hanya di Pulau Jawa saja. Organisasi Islam lainnya di luar Pulau Jawa semisal Nahdlatul Wathan (NW) di Nusa Tenggara Barat, Al-Khairaat di Sulawesi Tengah, dan Jamiyatul Washliyah di Sumatera Utara, juga mempunyai institusi pendidikan Islam yang telah mengakar.

Dalam perkembangannya, pendidikan agama Islam di Indonesia tidak hanya diajarkan di pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi Islam, tapi juga diajarkan di sekolah dan universitas umum sebagai sebuah mata pelajaran wajib; melalui Pendidikan Agama Islam (PAI). Regulasi terbaru yang mengatur PAI di sekolah dan universitas umum tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007.

Sebagai mata pelajaran wajib, tujuan pembelajaran PAI harus sejalan dengan tujuan negara, yaitu selain membentuk pribadi yang paham dan taat beragama, PAI juga bertujuan membentuk peserta didik agar menjadi warga negara yang baik. Pendidikan agama harus mampu memperkuat nilai-nilai kewargaan (*civic values*) seperti: toleransi, kebebasan, keadilan, dan persamaan.⁷ Sebagaimana yang juga pernah ditegaskan Ir. Soekarno pada sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Juni 1945 "bertuhan yang tumbuh di Indonesia haruslah bertuhan secara

Solahudin (2008). "The Workshop for Morality: The Islamic Creativity of Pesantren Daarut Tauhid in Bandung, Java." Canberra: ANU E Press; Martin van Bruinessen (2008). "Traditionalist and Islamist Pesantrens in Contemporary Indonesia" dalam Farish A. Noor, Yoginder Sikand & Martin van Bruinessen "The Madrasa in Asia: Political Activism and Transnational Linkages." Amsterdam: Amsterdam University Press; Noorhaidi Hasan (2008). "The Salafi Madrasas of Indonesia" dalam Farish A. Noor, Yoginder Sikand & Martin van Bruinessen "The Madrasa in Asia: Political Activism and Transnational Linkages." Amsterdam: Amsterdam University Press.

⁶ Lihat Ronald A. Lukens-Bull (2013). "Islamic Higher Education in Indonesia: Continuity and Conflict." New York: Palgrave MacMillan.

⁷ Tujuan Pendidikan Agama Islam tersebut terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Bab II Pasal 2 (poin 1) dan Pasal 5 (poin 4).

kebudayaan, yakni tiada egoisme agama, berkeadaban, hormat menghormati, dan berbudi pekerti”.⁸ Tujuan itu penting karena Indonesia adalah negara yang plural secara sosiologis.

Namun, menguatnya paham radikalisme di sekolah dan universitas menjadi ancaman serius saat ini. Radikalisme di dalam institusi pendidikan di Indonesia dewasa ini sudah sangat mengkhawatirkan. Beberapa studi mengkonfirmasi bahwa ideologi radikalisme dan intoleransi telah masuk secara masif dan terstruktur ke sekolah dan universitas. Infiltrasi tersebut terutama terjadi melalui kegiatan ekstrakurikuler keagamaan, alumni yang berafiliasi dengan gerakan radikal, keterlibatan langsung siswa dengan gerakan radikal di luar sekolah, guru PAI yang berpaham radikal, sampai muatan buku ajar PAI yang menyajikan materi yang bermuatan radikalisme. Yang memprihatinkan adalah para guru agama Islam sendiri memiliki pandangan keagamaan yang cenderung radikal dan eksklusif. Padahal merekalah aktor utama yang membentuk sikap dan perilaku keberagaman siswa di sekolah.⁹

Menguatnya radikalisme di sekolah dan universitas sejatinya tidak bisa dilepaskan dari kecenderungan meningkatnya konservatisme agama, gerakan transnasional radikal, dan terorisme yang berkembang dewasa ini.¹⁰ Selain itu, perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat siswa dan mahasiswa dengan mudah

⁸ Herbert Feith & Lance Castles (1988). "Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965." Jakarta: LP3ES. h.24

⁹ Beberapa studi-studi mutakhir tentang akar-akar radikalisme di sekolah umum di antaranya melalui: 1] kegiatan ekstrakurikuler Rohis, lihat Wahid Foundation (2016). "Riset Potensi Radikalisme di Kalangan Aktivistis Rohani Islam Sekolah-Sekolah Negeri." dan Salim HS, Hairus, Najib Kailani, dan Nikmal Azekiyah (2011). "Politik Ruang Publik Sekolah: Negosiasi dan Resistensi di SMUN di Yogyakarta." Yogyakarta: Centre for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS) UGM; 2] buku ajar PAI, lihat PPIM UIN Jakarta (2016). "Diseminasi Paham Eksklusif dalam Pendidikan Islam: Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah."; 3] guru PAI yang memiliki paham radikal dan eksklusif, lihat PPIM UIN Jakarta (2016). "Guru Agama, Toleransi, dan Isu-Isu Kehidupan Keagamaan Kontemporer di Indonesia."; 4] alumni dan siswa yang berafiliasi langsung dengan kelompok radikal di luar sekolah, lihat Bano Masooda, Didin Syafruddin, Azyumardi Azra, Abuddin Nata, Rusydy Zakaria, dan Suparto Sunoko (2016). "Study on Islamic Religious Education in Secondary Schools in Indonesia." Jakarta: Directorate of Islamic Education Ministry of Religious Affairs, Republic of Indonesia (Kemenag RI). Sedangkan studi tentang radikalisme di kampus, lihat M. Zaki Mubarak (2013). "Dari Semangat Islam Menuju Sikap Radikal: Pemikiran dan Perilaku Keagamaan Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta." *Ma'arif* Vol.8, No. 1-Juli 2013.

¹⁰ Lihat, Jamhari Makruf (2014). "Incubator for Extremism? Radicalism and Moderation in Indonesia's Islamic Education System." Policy Paper: Centre for Indonesian Law, Islam and Society (CILIS); Karen Bryner (2013). "Piety Projects: Islamic Schools for Indonesia's Urban Middle Class". Dissertation: Columbia University; dan Tan, Charlene (2011). "Islamic Education and Indoctrination: The Case in Indonesia." New York: Routledge.

mengakses materi-materi agama dari internet. Ada materi-materi keagamaan di internet yang bersifat inklusif, namun banyak juga yang bermuatan radikal dan intoleran.

Berdasarkan uraian di atas, studi ini mengkaji pandangan dan sikap keberagamaan siswa dan mahasiswa. Studi ini secara komprehensif mengkaji faktor-faktor dominan yang mempengaruhi pandangan keagamaan siswa dan mahasiswa dalam skala nasional. Penelitian ini berangkat dari kesadaran bahwa kemunculan dan pengaruh radikalisme tidak dapat dijelaskan hanya dengan melihat satu faktor tunggal saja. Ia harus dilihat sebagai fenomena yang kompleks dan membutuhkan pendekatan yang multidimensi, dan melibatkan berbagai tema-tema kunci seperti: demografi, makna hidup, religiusitas, perasaan terancam, kedekatan dengan ormas keagamaan, keluarga, media sosial, Islamisme, serta persepsi terhadap kinerja pemerintah.

Penelitian ini penting karena pada tahun 2020-2030, Indonesia diproyeksikan akan mengalami surplus demografi di mana terjadi peningkatan penduduk usia kerja secara signifikan.¹¹ Artinya siswa dan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan saat ini kelak akan mengisi surplus demografi tersebut dan membentuk wajah Indonesia pada periode tersebut. Apa jadinya masa depan bangsa Indonesia jika di masa yang akan datang mereka memiliki pandangan keagamaan yang radikal dan intoleran?

Studi ini juga berkontribusi mengisi celah studi-studi terdahulu terkait radikalisme dan intoleransi di dalam institusi pendidikan di Indonesia. Di tengah meningkatnya konservatisme agama, arus ideologi transnasional, dan gerakan ekstremisme saat ini, studi ini menjadi krusial untuk memetakan dan memahami radikalisme dan intoleransi di kalangan siswa dan mahasiswa. Selain itu, tentunya studi ini juga berguna dalam memberikan rekomendasi bagi kebijakan pemerintah di bidang Pendidikan Agama Islam khususnya. Sebab pendidikan merupakan sendi kehidupan bangsa yang harus dikelola dengan baik, dan kebijakan yang baik harus didukung oleh hasil penelitian yang akurat dan komprehensif.

¹¹ Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia, pada tahun 2020-2030 perkiraan penduduk usia produktif, antara 15 sampai 64 tahun, akan mencapai 70% dari total seluruh penduduk Indonesia. Lihat, www.bkkbn.go.id/detailpost/negara-harus-siap-bonus-demografi, 22 Agustus 2016.

II FOKUS KAJIAN DAN METODOLOGI

Studi ini menggunakan metode survei yang dilakukan secara nasional di 34 provinsi di Indonesia. Dari setiap provinsi diambil sampel masing-masing satu kabupaten dan kota. Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 1 September sampai 7 Oktober 2017 secara serentak di seluruh wilayah studi.

Sampel diambil dari populasi siswa Muslim sekolah umum di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan mahasiswa Muslim di bawah Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Kemenristek Dikti) maupun Kementerian Agama (Kemenag). Pada level siswa, unit observasi yaitu siswa Muslim jenjang SMA dan SMK kelas XI. Sedangkan unit observasi pada level mahasiswa yaitu mahasiswa Muslim yang sedang menjalani perkuliahan semester 3.

Sampel yang digunakan sebanyak 1.859—1522 siswa dan 337 mahasiswa—dari total populasi sebesar 11.917.538¹², dengan Margin of Error (MoE) sebesar $\pm 2,3\%$. Metode penarikan sampel yaitu *Multistage Sampling (Three Stage Stratified Sampling)* dengan strata kabupaten dan kota. Dalam menjamin kualitas data, penelitian ini melakukan mekanisme *spot check* sebanyak 5% dari sampel. Mekanisme secara teknis adalah jika sampel di sebuah kabupaten/kota sebanyak 1-4 sekolah, maka *spot check* dilakukan dengan memeriksa pelaksanaan survei di satu sekolah yang terkena sampel. Jika sampel sekolah sebanyak 5-10, dilakukan pemeriksaan sebanyak 2 sekolah yang terkena sampel. Terakhir jika sampel dalam satu kabupaten/lebih dari 10 sekolah, maka *spot check* dilakukan di 3 sekolah sampel.

Dua variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat keberagaman adalah radikalisme dan toleransi. Kedua variabel tersebut dibagi ke dalam dua level yaitu sikap/opini dan perilaku/aksi. Selanjutnya, khusus untuk variabel toleransi dibagi lagi menjadi toleransi eksternal dan internal.¹³ Dari klasifikasi tersebut maka didapat

¹² Proporsi populasi dari Kemendikbud/Ristekdikti sebesar 10.128.991, sedangkan Kemenag sebanyak 1.788.547.

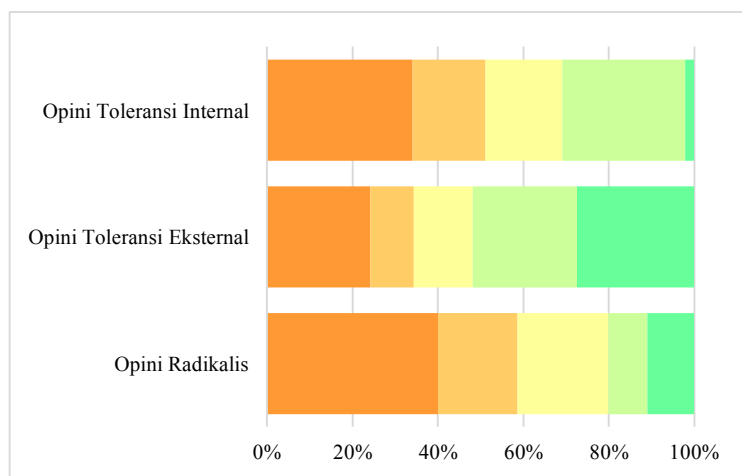
¹³ Toleransi eksternal adalah sikap dan perilaku toleransi terhadap pemeluk agama selain Islam. Sedangkan toleransi internal adalah sikap dan perilaku toleransi terhadap kelompok, paham, atau aliran yang berbeda di dalam umat Islam.

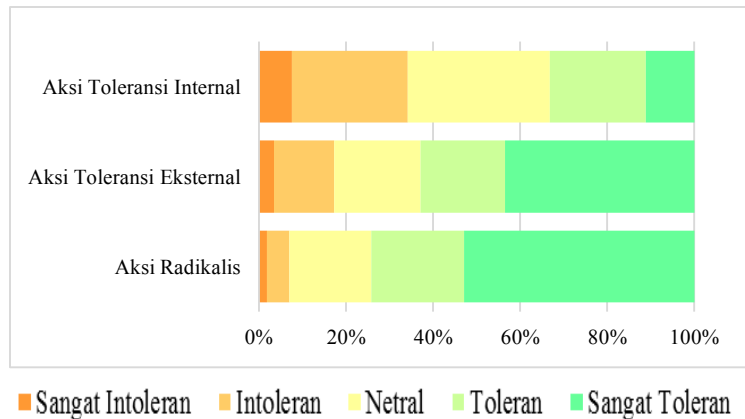
enam variabel independen: radikalisme opini (RADOP), radikalisme aksi (RADAC), toleransi eksternal opini (TEOP), toleransi eksternal aksi (TEAC), toleransi internal opini (TIOP), dan toleransi internal aksi (TIAC). Skor intoleransi diukur berdasarkan kategori: sangat intoleran, intoleran, netral, toleran, dan sangat toleran. Sedangkan radikalisme diukur dengan kategori: sangat radikal, radikal, netral, moderat, dan sangat moderat.

III LEVEL INTOLERANSI DAN RADIKALISME SISWA DAN MAHASISWA

Studi ini mengkonfirmasi adanya penguatan paham radikalisme dan intoleransi di kalangan siswa dan mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar mereka memiliki sikap/opini yang masuk dalam kategori intoleran/sangat intoleran dan radikal/sangat radikal. Namun jika dilihat dari sisi aksi/tindakan, mereka sebagian besar memiliki kecenderungan toleran dan moderat (Gambar 1). Walaupun secara tindakan mereka cenderung moderat dan toleran, tapi kecenderungan sikap mereka yang sebagian besar radikal dan intoleran sangat mengkhawatirkan, karena sikap yang demikian berpotensi menjadi tindakan radikal.

Gambar 1. Proporsi Siswa/Mahasiswa menurut Kategori Opini dan Aksi Intoleransi Internal, Intoleransi Eksternal, dan Radikalisme





Dilihat dari sisi sikap, siswa dan mahasiswa memiliki pandangan yang cenderung radikal. Jika digabungkan, mereka yang memiliki sikap yang radikal dan sangat radikal lebih dari separuh total responden yaitu sebesar 58,5%. Sedangkan mereka yang memiliki sikap moderat hanya sebesar 20,1%.

Data mengenai sikap intoleran juga memperlihatkan kecenderungan yang sama. Namun ada perbedaan antara sikap toleransi internal dan sikap intoleransi eksternal. Siswa dan mahasiswa cenderung lebih intoleran/sangat intoleran secara internal (51,1%) daripada eksternal (34,3%). Begitu pun dengan tingkat toleransi, mereka cenderung toleran secara eksternal (51,9%) ketimbang secara internal (31,1%).

Data tersebut menunjukkan bahwa siswa dan mahasiswa cenderung intoleran terhadap paham atau kelompok yang berbeda di dalam internal umat Islam daripada penganut agama lain. Sikap intoleransi internal mereka disebabkan oleh ketidaksukaan mereka terhadap Ahmadiyah dan Syiah. Sebanyak 86,55% setuju jika pemerintah melarang keberadaan kelompok-kelompok minoritas yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Selain itu, sebanyak 49% menyatakan tidak setuju jika pemerintah harus melindungi penganut Syiah dan Ahmadiyah.

Adapun sikap radikal dan intoleransi eksternal disebabkan oleh kebencian terhadap Yahudi. Sebanyak 53,74% siswa dan mahasiswa setuju jika Yahudi adalah musuh Islam, dan 52,99% setuju bahwa orang Yahudi itu membenci Islam. Salah satu pemicu sikap intoleran

terhadap Yahudi bisa dilacak pada buku ajar PAI yang kerap menggambarkan Yahudi sebagai kaum yang licik.¹⁴ Konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel juga turut berkontribusi terhadap persepsi intoleran terhadap Yahudi, di mana mereka setuju dengan pendapat bahwa umat Islam saat ini dalam kondisi terzalimi (55,08%).

Gambar 2. Sikap terhadap Syiah, Ahmadiyah, Yahudi, dan Kristen



Namun, kebencian semacam itu tidak terlalu berlaku terhadap umat Kristen. Siswa dan mahasiswa cenderung toleran kepada umat Kristen. Sebanyak 76,22% berpendapat bahwa umat Kristen tidak membenci umat Islam, dan mereka juga tidak keberatan jika umat agama lain memberi bantuan kepada lembaga-lembaga Islam (70,36%). Data ini mengkonfirmasi bahwa toleransi umat Islam, sebagai agama mayoritas, terhadap agama lain hanya sebatas agama-agama resmi yang diakui negara—Kristen salah satunya—namun tidak pada agama lain yang tidak diakui negara, termasuk Yahudi.

¹⁴ Lebih jauh mengenai gambaran Yahudi sebagai kaum yang dinilai licik dan musuh Islam, terdapat dalam buku ajar PAI SMP kelas 7 halaman 197 dan SMP kelas 8 halaman 8-9. Penjelasan lebih lanjut lihat laporan penelitian PPIIM UIN Jakarta "Diseminasi Paham Eksklusif dalam Pendidikan Islam: Telaah Kebijakan dan Politik Produksi Bahan Ajar PAI" (2016).

Faktor Pendorong Radikalisme dan Intoleransi

Selain faktor Yahudi, Ahmadiyah, dan Syiah yang mendorong tingkat intoleransi dan radikalisme, ada tiga faktor dominan lain: 1] guru dan model pembelajaran PAI, 2] akses internet sebagai sumber pengetahuan agama, dan 3] persepsi tentang kinerja pemerintah.

Guru dan model pembelajaran PAI. Sebanyak 48,95% siswa dan mahasiswa merasa bahwa pendidikan agama memiliki porsi besar

Gambar 3. Porsi materi PAI dan pengaruh untuk tidak bergaul dengan pemeluk agama lain



dalam mempengaruhi mereka agar tidak bergaul dengan pemeluk agama lain. Sedangkan mereka yang merasa bahwa pendidikan agama sama sekali tidak mempengaruhi mereka untuk tidak bergaul dengan pemeluk agama lain hanya 23,08%. Kondisi ini cukup mengkhawatirkan karena pendidikan agama cenderung tidak memupuk sikap toleransi siswa terhadap pemeluk agama lain. Padahal sikap toleran sangat dibutuhkan dalam kondisi masyarakat yang plural seperti Indonesia.

Fakta tersebut diakibatkan dari proporsi pendidikan agama yang hampir tidak menekankan pada penguatan nilai-nilai toleransi dan keragaman kepada para siswa. Hal tersebut dilihat dari fakta bahwa siswa merasa materi pendidikan agama yang

paling banyak mereka terima adalah terkait: 1] keimanan, ketakwaan dan ibadah (63,47%); 2] akhlak mulia dan nilai-nilai moral (31,36%); 3] ukhuwah Islamiyah (3,82%); dan 3] kejayaan Islam (1,34%). Hanya 12,96% dari materi akhlak mulia dan nilai-nilai moral yang dirasa memberikan materi tentang menghargai orang lain yang berbeda.

Hasil ini sesuai dengan kompetensi dasar yang diinginkan dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam. Penekanan yang besar pada materi tentang keimanan, ketakwaan dan ibadah membatasi waktu guru untuk memasukkan materi keberagaman dan toleransi. Hal itu terkonfirmasi berdasarkan persepsi guru (91,20%) yang menyatakan bahwa siswa dan mahasiswa merasa keimanan dan ketakwaan mereka semakin bertambah setelah mendapatkan mata pelajaran PAI. Betul bahwa materi PAI memuat bab yang mengajarkan *Tasamuh* (toleransi).¹⁵ Namun porsinya masih jauh jika dibandingkan dengan materi keimanan, ketakwaan dan ibadah.

Akses internet untuk sumber pengetahuan agama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa internet berpengaruh besar terhadap meningkatnya radikalisme dan intoleransi. Siswa dan mahasiswa yang tidak memiliki akses internet lebih memiliki sikap moderat dibandingkan mereka yang memiliki akses internet. Padahal mereka yang memiliki akses internet sangat besar yaitu sebanyak 84,94%, dan hanya 15,06% sisanya yang tidak memiliki akses internet.

Jenis website dan ustadz/ustadzah yang dijadikan rujukan sangat berpengaruh terhadap tingkat radikalisme dan intoleransi mereka. Walaupun siswa dan mahasiswa menyatakan website yang paling sering diakses untuk mendapat pengetahuan agama adalah nuonline.com yang merepresentasikan Islam moderat, namun situs-situs yang masuk dalam kategori radikal juga sering mereka akses, seperti: eramuslim.com, hidayatullah.com, voa-islam.com, dan arrahmah.com. Website-website yang terakhir itu kerap menyuguhkan berita-berita yang memuat konten radikal.

¹⁵ Lihat Bano Masooda, Didin Syafruddin, Azyumardi Azra, Abuddin Nata, Rusydy Zakaria, dan Suparto Sunoko (2016). "Study on Islamic Religious Education in Secondary Schools in Indonesia." Jakarta: Directorate of Islamic Education Ministry of Religious Affair, Republic of Indonesia (Kemenag RI).

Sedangkan ustadz/ustadzah yang paling populer berturut-turut adalah Mamah Dedeh, Yusuf Mansur, dan Abdullah Gymnastiar. Selanjutnya, ustadz populer di internet diikuti Zakir Naik, Hanan Attaki, Arifin Ilham dan Khalid Basalamah. Kepopuleran Zakir Naik dan Khalid Basalamah menjadi perhatian penting karena mereka bisa dikatakan sebagai ustadz yang kerap menyampaikan ceramah yang bermuatan radikal. Namun, sangat disayangkan karena ustadz-ustadz yang berafiliasi dengan ormas Islam *mainstream* yang moderat, seperti dari NU dan Muhammadiyah, tidak masuk dalam radar sebagai ustadz yang populer bagi kalangan siswa dan mahasiswa. Nama-nama ulama moderat seperti Quraish Syihab, Ahmad Syafii Maarif, Mustafa Bisri, Haedar Nasir dan Nazaruddin Umar, tidak masuk radar ustadz yang populer di kalangan siswa dan mahasiswa.

Gambar 4.
Evaluasi terhadap kinerja pemerintah dan penerimaan terhadap NKRI, dan demokrasi



hukum kurang hingga sangat tidak adil.

Persepsi tentang Demokrasi, NKRI, dan kinerja pemerintah. Walaupun siswa dan mahasiswa merasa belum puas dengan kinerja pemerintah, penerimaan mereka terhadap prinsip-prinsip dasar negara—Pancasila, NKRI, dan demokrasi—tetap tinggi. Sebanyak 52,29% menyatakan bahwa kondisi ekonomi saat ini parah dan sangat parah, terutama dalam hal kesenjangan ekonomi. Kemudian 43,46% menyatakan kondisi ekonomi cukup parah. Dari aspek penegakan hukum, sebanyak 69,80% menyatakan penegakan

Evaluasi negatif terhadap kinerja pemerintah tidak berbanding lurus dengan penerimaan mereka terhadap NKRI dan demokrasi. Mereka umumnya masih meyakini bahwa bentuk negara NKRI dan sistem politik demokrasi adalah terbaik untuk Indonesia. 90,16% setuju bahwa pengamalan Pancasila dan UUD 1945 sejalan dengan nilai-nilai Islam. Sebanyak 85% setuju bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik. Kemudian sebanyak 80,74% tidak setuju terhadap pernyataan bahwa pemerintah Indonesia yang berdasar Pancasila dan UUD 1945 adalah kafir dan *thaghut*.

Data ini menunjukkan loyalitas siswa dan mahasiswa terhadap NKRI dan demokrasi tidak diragukan lagi. Kondisi ini menimbulkan optimisme bahwa masa depan NKRI dan stabilitas demokrasi masih akan kokoh, walaupun di tengah kekecewaan terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi dan penegakan hukum. Karena itu, perbaikan ekonomi dan penegakan hukum harus tetap menjadi perhatian pemerintah. Jangan sampai masalah struktural ini memantik generasi mudah untuk bersikap radikal, seperti pengalaman negara-negara gagal di Timur Tengah.

Optimisme di atas bukan tanpa masalah. Walaupun penerimaan mereka terhadap NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan demokrasi sangat tinggi, namun aspirasi terhadap penerapan syariat Islam juga cukup tinggi. Sebanyak 91,23% setuju jika syariat Islam perlu diterapkan dalam bernegara, dan 61,92% memiliki pemahaman bahwa kekhalifahan merupakan bentuk pemerintahan yang diakui dalam ajaran Islam.

IV PERAN FAKTOR PERSONAL

Latar belakang demografi

Jenis Kelamin. Jika dilihat dari demografi berdasarkan jenis kelamin, siswa dan mahasiswa, baik perempuan maupun laki-laki cenderung mempunyai sikap/opini keagamaan yang sebagian besar radikal, yaitu perempuan sebanyak 60,4%, dan laki-laki sebanyak 56,2%. Sedangkan mereka yang memiliki sikap moderat hanya 18,2% untuk perempuan, dan 22,4% laki-laki.

Walaupun sikap keberagaman mereka cenderung radikal, namun dari sisi perilaku/aksi mereka cenderung sangat moderat. Sebanyak 75,6% siswa dan mahasiswa perempuan mempunyai perilaku keberagaman yang moderat, sedangkan laki-laki sebesar 49,50%. Mereka yang mempunyai perilaku keagamaan yang radikal hanya sebesar 6,1% untuk perempuan dan 8% untuk laki-laki.

Tabel 1. RADOP, RADAC, TEOP dan TIOP pada demografi jenis kelamin

		Intoleran (%)	Netral (%)	Toleran (%)
<i>TEOP</i>				
Siswa/Mahasiswa <i>p=0,017</i>	Perempuan	32.4	14.2	53.4
	Laki-Laki	36.5	13.2	22.4
<i>TIOP</i>				
Siswa/Mahasiswa <i>p=0,1.86</i>	Perempuan	48.9	18.9	32.2
	Laki-Laki	53.7	16.7	29.6
JENIS KELAMIN				
		Radikal (%)	Netral (%)	Moderat (%)
<i>RADOP</i>				
Siswa/Mahasiswa <i>p=0,043</i>	Perempuan	60.4	21.4	18.2
	Laki-Laki	56.2	21.3	22.4
<i>RADAC</i>				
Siswa/Mahasiswa <i>p=0,045</i>	Perempuan	6.1	18.3	75.6
	Laki-Laki	8	23.2	49.50

Pada level intoleransi, siswa dan mahasiswa perempuan mayoritas toleran terhadap penganut agama selain Islam. Sebanyak 53,4% perempuan yang memiliki sikap toleran, sedangkan laki-laki hanya sebanyak 22,4%. Jika dilihat persentase intoleransinya, masih cukup besar mereka yang intoleran di kedua kategori jenis kelamin, yaitu laki-laki sebesar 36,5%, dan perempuan 32,4%. Selain itu, mereka cenderung intoleran terhadap aliran atau kelompok yang ada di dalam internal umat Islam, data menunjukkan laki-laki lebih intoleran (53,7%) daripada perempuan (48,9%).

Status Sosial Ekonomi. Data menunjukkan bahwa tidak ada korelasi signifikan antara status ekonomi dengan sikap radikalisme. Artinya, siswa yang orang tuanya berpenghasilan rendah tidak serta merta menjadi lebih radikal dibandingkan siswa yang orang tuanya berpenghasilan lebih tinggi, begitu pun sebaliknya. Sikap radikal ditemukan di kalangan siswa yang orang tuanya berpenghasilan kurang dari 1 juta (59,1%), yang berpenghasilan 1 sampai 2,5 juta (63.2%), dan juga yang berpenghasilan 5 sampai 7,5 juta (63.4%).

Namun pada level tindakan, terdapat korelasi signifikan antara status sosial ekonomi dengan aksi radikalisme. Siswa yang orang tuanya berpenghasilan rendah cenderung lebih radikal dari para siswa yang orang tuanya berpenghasilan lebih tinggi. Secara berturut-turut, perilaku radikal paling banyak ditemukan di kalangan siswa yang orang tuanya berpenghasilan di bawah 1 juta (10,3%), kemudian 1 sampai 2,5 juta (6,3%), 2,5 sampai 5 juta (6,2%), lalu yang berpenghasilan 5 sampai 7,5 juta (8%), dan terendah adalah yang berpendapatan di atas 7,5 juta (4%).

Selanjutnya pada level sikap intoleransi eksternal, siswa yang status sosial ekonominya lebih rendah justru lebih toleran. Mereka yang orang tuanya berpenghasilan di bawah 1 juta (50%) dan antara 1 sampai 2,5 juta (53,2%) lebih toleran daripada mereka yang orang tuanya berpenghasilan 2,5 juta sampai 5 juta (48,9%) dan di atas 7,5 juta (44%). Data ini konsisten dengan tingkat intoleransi mereka, di mana mereka yang orang tuanya berpenghasilan lebih dari 7,5 juta tergolong paling intoleran, yaitu sekitar 52%, sedangkan yang lainnya di bawah persentase itu antara 31,8% sampai 37,1%.

Dari sisi perilaku toleransi eksternal, sebarannya merata antar kelompok penghasilan. Mereka memiliki perilaku yang toleran terhadap pemeluk agama lain (rata-rata di atas 50%). Sebanyak 63,1% mereka yang penghasilan orang tuanya di bawah 1 juta memiliki perilaku eksternal yang toleran, begitu juga dengan 69,4% siswa yang orang tuanya berpenghasilan di atas 1 sampai 7,5 juta.

Tabel 2. RADOP, RADAC, TEOP dan TEAC pada demografi status sosial ekonomi

STATUS SOSIAL EKONOMI									
RADOP				Radikal (%)		Netral (%)	Moderat (%)		
Siswa/ Mahasiswa <i>p=0,047</i>	<1 Jt			59.1		23.4	17.4		
	1 - 2.5 Jt			63.2		20	16.8		
	2.5 - 5 Jt			54.7		20.3	24.9		
	5 - 7.5 Jt			63.4		206	15.8		
	>7.5 Jt			52		24	24		
RADAC									
Siswa/ Mahasiswa <i>p=0,182</i>	<1 Jt			10.3		18.3	71.4		
	1 - 2.5 Jt			6.3		20.9	72.8		
	2.5 - 5 Jt			6.2		19.7	74.1		
	5 - 7.5 Jt			8		19	73		
	>7.5 Jt			4		16	77.5		
		Intol eran	Netral	Toleran	<i>p- value</i>	Intoleran	Netral	Toleran	<i>p- value</i>
STATUS SOSIAL EKONOMI		TEOP (%)				TEAC (%)			
Siswa/ Mahasiswa	<1 Jt	34.3	15.7	50	0.709	16.1	20.7	63.1	0.000
	1 - 2.5 Jt	35.6	11.5	53.2		20.8	19.4	59.9	
	2.5 - 5 Jt	37.1	14.10	48.9		18.7	20.3	60.9	
	5 - 7.5 Jt	31.8	14	54		23.8	20.6	55.5	
	>7.5 Jt	52	4	44		52	19.1	69.4	

Studi ini tidak menunjukkan bahwa faktor kemiskinan atau sosial ekonomi mempunyai korelasi yang kuat dengan sikap radikalisme. Sementara itu, pada tindakan radikalisme serta tindakan dan sikap intoleransi faktor kemiskinan cenderung tidak berkorelasi kuat dengan tingkat radikalisme dan intoleransi. Mereka yang berstatus sosial ekonomi lebih tinggi memiliki tingkat intoleransi yang lebih tinggi. Sedangkan mereka yang berstatus sosial ekonomi paling rendah (penghasilan di bawah 1 juta) cenderung lebih toleran. Untuk itu, faktor penyebab intoleran dan radikalnya seorang merupakan faktor yang kompleks. Faktor status sosial-ekonomi bukan menjadi faktor utama yang menentukan seorang menjadi radikal. Salah satu penjelasan utamanya adalah faktor pluralitas masyarakat. Bagi masyarakat yang plural, yang ditandai dengan banyaknya pembelahan-pembelahan sosial (*social cleavages*), salah satu konsekuensi buruknya adalah adanya potensi yang kuat terjadi konflik

etnik dan kompetisi politik.¹⁶ Untuk itu, pembelahan-pembelahan sosial yang plural di Indonesia dalam konteks ini bisa dilihat sebagai salah satu pemicu meningkatnya radikalisme dan intoleransi.

Memang banyak studi yang menganggap bahwa faktor kemiskinan menjadi pemicu utama sikap radikalisme. Radikalisme dan konflik muncul dari kondisi pembangunan ekonomi yang lemah.¹⁷ Juga ada kaitan yang kuat antara kondisi sosial ekonomi, pertumbuhan penduduk usia muda, dan perilaku radikalisme pemuda. Fenomena *Arab Spring* dapat dibaca dalam konteks tersebut.

Kondisi sosial-ekonomi yang memburuk di sebagian negara-negara Timur Tengah mendorong generasi muda mencari solusi dengan menumbangkan rezim-rezim yang mereka anggap gagal. Kondisi buruk itu kemudian menghasilkan perasaan tidak ada masa depan yang cerah. Kondisi itu kemudian membawa mereka kepada sikap dan perilaku radikal, dan bentuk radikalisme yang paling dekat dengan generasi muda di negara-negara Muslim adalah radikalisme agama.¹⁸ Faktor-faktor struktural seperti ini tampaknya tidak terjadi di Indonesia.

Latar Belakang Pesantren. Mereka yang memiliki latar belakang pesantren cenderung lebih radikal, baik pada sikap maupun perilaku. Pada level sikap, sebanyak 66,6% yang berlatar belakang pesantren memiliki pemahaman keberagaman yang radikal. Sedangkan mereka yang tidak, lebih rendah sepuluh persen, sebesar 56,4%. Pada level tindakan, 10,5% mereka yang memiliki latar belakang pesantren juga cenderung lebih berperilaku radikal, ketimbang yang tidak memiliki latar belakang pesantren (6,1%).

¹⁶ Lihat studi James A. Piazza (2006) "Rooted in Poverty?: Terrorism, Poor Economic Development, and Social Cleavages", *Terrorism and Political Violence*, 18:1, 159-177; James Anderson dan Ian Shuttleworth (1998). "Sectarian Demography, Territoriality and Political Development in Northern Ireland." *Political Geography*, Vol. 17, No. 2, pp. 187-208, 1998.

¹⁷ Paul Stevenson (1977). "Frustration, Structural Blame, and Leftwing Radicalism." *The Canadian Journal of Sociology/Cahiers canadiens de sociologie*, Vol.2, No.4 (Autumn, 1977), pp. 355-372; George A. Lundberg (1927). "The Demographic and Economic Basis of Political Radicalism and Conservatism." *American Journal of Sociology*, Vol. 32, No.5 (Mar., 1927), pp. 719-732; Helen Ware (2005). "Demography, Migration and Conflict in the Pacific." *Journal of Peace Research*, Vol. 42, No.4, *Special Issue on the Demography of Conflict and Violence* (Jul., 2005), pp. 435-454.

¹⁸ Graham E. Fuller (2004) "The Youth Crisis in Middle Eastern Society", Michigan: Institute for Social Policy and Understanding. h. 9-11.

Data tersebut juga konsisten jika melihat tingkat sikap dan perilaku moderat mereka. Pada level sikap keberagaman, siswa yang tidak berlatar belakang pesantren cenderung lebih moderat (21,2%) ketimbang mereka yang pernah mendapatkan pendidikan di pesantren (15,9%). Begitu pun pada level tindakan, sebanyak 75,6% siswa yang tidak memiliki latar belakang pesantren berperilaku moderat, lebih tinggi dari mereka yang pernah mengenyam pendidikan di pesantren (68,9%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa mereka yang pernah mendapatkan pendidikan di pesantren cenderung lebih radikal baik dari segi sikap dan perilaku.

Temuan ini mengklarifikasi anggapan bahwa orang yang mendapatkan pendidikan agama yang mendalam akan cenderung lebih moderat. Pesantren sebagai institusi pendidikan agama yang mapan di Indonesia tentu mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk pemahaman Islam yang moderat. Namun, dengan kuatnya arus ideologi trans-nasional yang membawa ideologi radikal maka sejatinya perlu dikaji lebih mendalam jenis pesantren yang diikuti siswa dan mahasiswa. Misalnya pesantren milik kelompok Jamaah Islamiyah dan kalangan *salafi* saat ini tumbuh dengan pesat di beberapa daerah di Indonesia. Walaupun tidak banyak, tokoh-tokoh ekstremis dan radikal lahir dari pesantren jenis ini. Untuk itu bisa dikatakan bahwa selain mempunyai potensi membentuk seorang menjadi Muslim yang moderat, pesantren juga dapat membentuk Muslim yang radikal, keduanya tergantung dari jenis pesantren tersebut.¹⁹

¹⁹ Beberapa studi yang mengkaji topik ini seperti: Ali Maksum (2015). "Model Pendidikan Toleransi di Pesantren Modern dan Salaf", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Volume 03, Nomor 1, Mei 2015, Hal 82-108; Thohir Yuli Kusmanto, Moh. Fauzi dan M. Mukhsin Jamil (2015). "Dialektika Radikalisme dan Anti Radikalisme di Pesantren." *Walisongo*, Volume 23, Nomor 1, Mei 2015; Ayub Mursalin dan Ibnu Katsir (2010). "Pola Pendidikan Keagamaan Pesantren dan Radikalisme: Studi Kasus Pesantren-Pesantren di Provinsi Jambi", *Kontekstualika*, Vol. 25, No.2, 2010.

Tabel 3. RADOP, RADAC, TEOP dan TEAC pada demografi latar belakang pesantren

LATAR PENDIDIKAN PESANTREN									
			Radikal (%)	Netral (%)	Moderat (%)				
<i>RADOP</i>									
Siswa/Mahasiswa <i>p=0,000</i>	Pesantren		66.6	17.4	15.9				
	Non-Pesantren		56.4	22.4	21.2				
<i>RADAC</i>									
Siswa/Mahasiswa <i>p=0,015</i>	Pesantren		10.5	20.5	68.9				
	Non-Pesantren		6.1	18.3	75.6				
		Intoleran	Netral	Toleran	<i>p-value</i>	Intoleran	Netral	Toleran	<i>p-value</i>
LATAR PENDIDIKAN PESANTREN		<i>TEOP (%)</i>				<i>TEAC (%)</i>			
Siswa/Mahasiswa	Pesantren	22.8	12.8	64.4	<i>0.000</i>	11.3	19	69.7	<i>0.004</i>
	Non-Pesantren	37.3	14	48.7		18.9	20	61.1	
		<i>TIOP (%)</i>				<i>TIAC (%)</i>			
Siswa/Mahasiswa	Pesantren	48.4	18.2	57.4	<i>0.351</i>	38.2	29.2	32.5	<i>0.333</i>
	Non-Pesantren	51.8	17.8	30.3		33.1	33.6	33.4	

Berbeda dari tingkat radikalisme, dari segi intoleransi, siswa dan mahasiswa yang pernah mendapatkan pendidikan di pesantren lebih toleran. Pada sikap toleransi eksternal, sebanyak 64,4% yang berlatar belakang pesantren memiliki sikap toleran, sedangkan yang tidak sebesar 48,8%. Demikian pula jika dilihat dari tingkat intoleransinya, sebanyak 37,3% yang tidak pernah menempuh pendidikan pesantren lebih intoleran daripada yang pernah belajar di pesantren (22,8%).

Pada perilaku toleransi eksternal, siswa dan mahasiswa baik yang berlatar belakang pesantren maupun tidak, memiliki perilaku yang mayoritas cenderung sangat toleran, yaitu rata-rata di atas 60%. Namun jika dilihat dari perilaku toleransi internal, mereka cenderung intoleran. Mereka yang pernah belajar di pesantren lebih intoleran (38,2%) dari pada yang tidak pernah (33,1%).

Induk Kementerian. Aspek demografi lainnya yang dilihat adalah berdasarkan induk kementerian di mana siswa dan mahasiswa bernaung; Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan

Tinggi. Berdasarkan kategori demografi tersebut, mereka yang di bawah Kemenag memiliki sikap keagamaan lebih radikal, sebesar 65,6% daripada yang berada di bawah kementerian lain, yaitu 56%. Namun, pada level tindakan, siswa di bawah ketiga kementerian tersebut cenderung memiliki perilaku yang moderat, yaitu sama-sama sebesar 74%.

Level sikap intoleransi menunjukkan pola yang berbeda dengan level radikalisme. Siswa dan mahasiswa di bawah Kemenag justru memiliki sikap toleransi eksternal yang lebih besar (70,5%) daripada mereka yang berada di bawah Kemendikbud/Kemenristek Dikti (45,4%). Sikap toleransi internal menunjukkan pola yang sama dengan sikap toleransi eksternal. Mereka yang berada di bawah Kemendikbud/Kemenristek Dikti lebih intoleran (54,3%) daripada yang berada di bawah Kemenag (42,3%).

Tabel 4. RADOP, RADAC, TEOP, TEAC, TIOP dan TIAC pada demografi induk kementerian

INDUK KEMENTERIAN				
		Radikal (%)	Netral (%)	Moderat (%)
<i>RADOP</i>				
Siswa/Mahasiswa <i>p=0,000</i>	Kemenag	65.6	17.7	16.7
	Kemendikbud	56	22.7	21.3
<i>RADAC</i>				
Siswa/Mahasiswa <i>p=0,951</i>	Kemenag	6.9	18.3	74.8
	Kemendikbud	7	18.9	74

Intoleran Netral Toleran *p*-value Intoleran Netral Toleran *p*-value

INDUK KEMENTERIAN		TEOP (%)			TEAC (%)				
<i>Siswa/Mahasiswa</i>	Kemenag	16.7	12.8	70.5	0.000	10.8	15.9	73.3	0.000
	Kemendikbud	40.6	14.1	45.4		19.7	21.2	59.1	
		TIOP (%)			TIAC (%)				
<i>Siswa/Mahasiswa</i>	Kemenag	42.3	16.9	40.8	0.000	35.6	27.1	37.2	0.019
	Kemendikbud	54.3	18.3	27.5		33.5	34.6	31.8	

Untuk level perilaku toleransi eksternal, tampak siswa dan mahasiswa di bawah ketiga induk kementerian cenderung memiliki perilaku yang toleran, dan mereka yang di bawah Kemenag cenderung lebih toleran. Sebanyak 73,3% yang memiliki perilaku toleran terhadap agama atau pemeluk agama selain Islam berada di bawah Kemenag, sementara mereka yang di bawah Kemendikbud/Kemenristek Dikti sebanyak 59,1%.

Sedangkan pada level perilaku toleransi internal, sebanyak 33,5% berada di bawah Kemendikbud/Kemenristek Dikti berperilaku intoleran, dan sebanyak 35,6% yang di bawah kementerian lainnya memiliki perilaku intoleran kepada kelompok-kelompok yang dianggap sesat dan menyimpang di dalam internal umat Islam.

Makna hidup, religiusitas, dan perasaan terancam

Beberapa literatur menyatakan bahwa ada kesamaan kondisi psikologis antara pelaku teroris dan kaum radikal. Mereka adalah orang-orang yang sedang mengalami keterkucilan dan keterasingan secara sosial, tidak percaya terhadap pemerintah yang berkuasa dan tidak setuju dengan kebijakan luar negeri pemerintah.²⁰ Kondisi-kondisi itu pada akhirnya menimbulkan kedukaan pada level individu. Pada konteks 'kedukaan' inilah proses radikalisme pada level personal dapat diasosiasikan. Sedangkan variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat kedukaan seseorang adalah dengan melihat persepsi makna hidup.²¹

Studi ini melihat apakah variabel makna hidup, persepsi kesalehan atau religiusitas, dan perasaan terancam berhubungan dengan keempat variabel terikat dalam riset ini, yaitu sikap dan perilaku toleransi internal dan eksternal, serta sikap dan perilaku radikalisme. Untuk variabel makna hidup dan persepsi kesalehan ditanyakan dalam satu item secara berturut-turut "Apakah selama ini Anda merasa hidup Anda bermakna?", "Apakah Anda merasa bahagia akhir-akhir ini?", dan "Sejauh mana Anda merasa religius?".

Sedangkan untuk persepsi Islam sebagai korban, ditanyakan dalam 2 item yang merupakan pernyataan dan responden diminta untuk menjawab apakah dia setuju atau tidak setuju terhadap pernyataan tersebut. Kedua pernyataan tersebut adalah "Setuju dengan

²⁰ Studi yang telah membahas topik ini misalnya Jamie Bartlett, Jonathan Birdwell, & Michael King (2010). "The Edge of Violence: a Radical Approach to Extremism." London: Demos.

²¹ Pada level individu faktor kedukaan menjadi salah satu faktor personal yang kuat berasosiasi dengan radikalisme. Kehilangan makna hidup dan keterasingan dari lingkungan seringkali terjadi saat kita kehilangan orang terdekat, dan kondisi banyak ditemukan dalam kasus-kasus terorisme. Dikarenakan tidak mudah untuk mengukur kedukaan seseorang, maka variabel persepsi makna hidup dijadikan proksi untuk mencoba mendapatkan gambaran tingkat kedukaan seseorang. Lihat Mitchell D. Silber & Arvin Bhatt (2007). "Radicalization in the West: The Homground Threat," dalam McCauley, C., & Moskalenko, S. (2017). "Understanding political radicalization: The two-pyramids model." *American Psychologist*, 72(3), 205.

pendapat bahwa umat Islam saat ini sedang terzalimi”, dan “Secara ekonomi, orang-orang non-Muslim lebih diuntungkan dibandingkan orang Muslim”. Pada tahap ini analisis dan interpretasi dilakukan untuk setiap item dan bukan digabungkan menjadi satu skor total karena itemnya berupa dikotomi.

Makna hidup. Asumsinya adalah semakin seseorang merasa hidupnya bermakna dan bahagia, maka semakin kecil kemungkinan individu tersebut terlibat dalam sikap dan perilaku radikal. Dalam kasus terorisme sendirian (*lone-wolf terrorist*) sering ditemukan kondisi gangguan psikologis seperti depresi, kesepian, dan gangguan emosi lain yang mengikutinya pada diri pelaku-pelaku teror.²²

Survei ini menemukan bahwa pada level sikap radikalisme, mereka yang merasa hidupnya bermakna cenderung memiliki sikap yang radikal (58,6%). Artinya di mana makin radikal sikap siswa/mahasiswa, mereka lebih cenderung mempersepsi hidupnya bermakna. Temuan itu mengindikasikan bahwa bisa jadi proses radikalisasi pada sikap justru membutuhkan penghayatan makna hidup terlebih dahulu sebelum tiba pada kondisi sikap radikal. Sementara itu, pada kategori sikap toleransi eksternal, mereka yang mempersepsi dirinya bermakna justru cenderung berada di level toleran atau sangat toleran (51,9%).

Tabel 5. Persepsi makna hidup berdasarkan kategori RADOP dan TEOP

<i>Apakah selama ini anda merasa hidup anda bermakna? Ya</i>				
	Radikal/intoleran (%)	Netral (%)	Moderat/toleran (%)	X²
<i>RADOP</i> p=0,029	58,6	21.4	20.1	28.334^a
<i>TEOP</i> p=0,031	34,3	13.8	51,9	28.045^a

²² *Ibid.* McCauley & Moskalenko, 2017.

Persepsi Relijiusitas. Tingkat relijiusitas sering dianggap sebagai faktor yang berkontribusi terhadap perilaku intoleran dan radikal. Namun literatur-literatur yang ada juga belum secara meyakinkan melihat linearitas antara relijiusitas dengan perilaku intoleran dan radikal seseorang. Artinya belum tentu semakin relijius seseorang akan cenderung semakin berperilaku radikal dan intoleran. Untuk itu, penting untuk mengecek dimensi relijiusitas baik dari aspek sikap maupun perilaku. Secara teoretis memang jenis relijiusitas yang bersifat *quest* (pencarian spiritualitas) cenderung lebih toleran daripada relijiusitas dalam konteks ritual ibadah. Pada variabel relijiusitas, survei ini menemukan bahwa makin tinggi persepsi relijiusitasnya pada level perilaku radikal, siswa dan mahasiswa yang menyatakan dirinya religius cenderung moderat (74,3%).

Tabel 7. Persepsi relijiusitas berdasarkan kategori RADAC

Sejauh mana anda merasa relijius? Relijius/sangat relijius

	Radikal (%)	Netral (%)	Moderat (%)	X²
RADAC <i>p=0,007</i>	7	18.8	74,3	32.993

Perasaan Terancam. Faktor personal lain yang juga selama ini ditemukan banyak berkontribusi terhadap sikap dan perilaku radikalisme adalah persepsi bahwa Islam adalah korban atau dalam kondisi terzalimi. Meskipun tidak berdiri sendiri, persepsi Islam sebagai korban ini ditemukan berkontribusi cukup signifikan dalam beberapa kasus radikalisme. Beberapa studi mengatakan bahwa aspek ekonomi, lebih daripada aspek relijiusitas dalam mempengaruhi perilaku radikalisme.²³

Variabel ini mencoba melihat pendapat responden terhadap pernyataan bahwa Islam saat ini menjadi korban untuk dapat memprediksi sikap dan perilaku radikalisme dan intoleransi. Berbagai teori menyatakan bahwa bobot identitas yang ditampilkan dalam

²³ Lihat misalnya J. Esteban & Ray, D. (2011). "A model of ethnic conflict." *Journal of the European Economic Association*, 9(3), 496-521; A. Richards (2003). "Socio-Economic roots of Radicalism? Towards explaining the appeal of Islamic Radicals." DIANE Publishing.

framing korban sangat manjur dalam memupuk radikalisme dan intoleransi.

Untuk kategori sikap radikal, mayoritas mereka yang menjawab pertanyaan ini memiliki skor di kategori sangat radikal atau radikal. Persentase yang setuju pada pendapat bahwa Islam dalam kondisi terzalimi cenderung lebih memiliki pandangan keagamaan yang radikal lebih besar (64,3%) daripada responden yang memiliki sikap moderat atau sangat moderat (16,5%).

Namun, terkait sikap toleransi eksternal, siswa dan mahasiswa yang memandang Islam sedang terzalimi cenderung lebih banyak berada di kategori toleran (56,4%). Tidak banyak responden yang setuju bahwa Islam dalam kondisi dizalimi yang tergolong intoleran, dan perbedaan ini signifikan secara statistik.

Tabel 8. Perasaan terancam berdasarkan kategori RADOP dan TEOP

	Radikal/intoleran (%)	Netral (%)	Moderat/toleran (%)	X²
<i>RADOP</i> p=0,000	64,3	19,1	16,5	6,535
<i>TEOP</i> p=0,001	31,2	12,4	56,4	9,411

V PERAN FAKTOR LINGKUNGAN

Kedekatan dengan ormas keagamaan

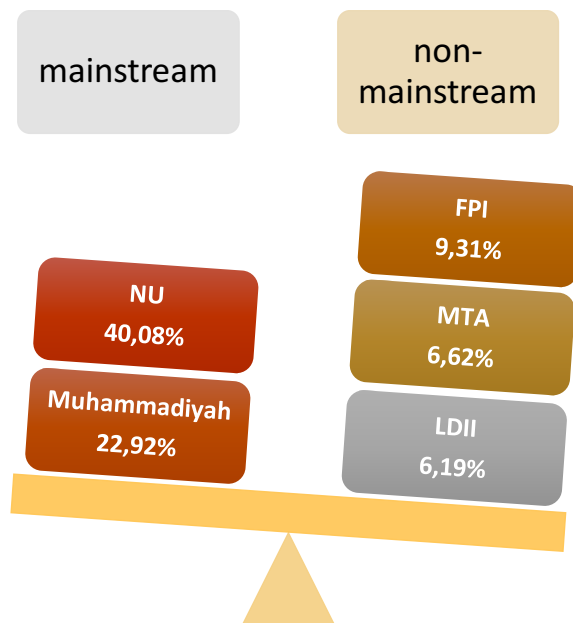
Temuan survei memperlihatkan bahwa siswa dan mahasiswa merasa dekat dengan ormas *mainstream* NU dan Muhammadiyah. Sementara itu mereka merasa cenderung tidak dekat dengan ormas Islam radikal, yakni Front Pembela Islam (FPI) dan Majelis Tafsir Al-Quran (MTA) yang dijadikan contoh dalam studi ini. Hanya 9.3% yang menyatakan bahwa FPI adalah organisasi keagamaan yang paling dekat dengan siswa/mahasiswa, sedangkan 90.7% menyatakan tidak dekat dengan FPI. Mereka yang merasa dekat dengan FPI paling banyak tersebar di enam provinsi, yaitu Kalimantan Barat, 29.2%; Jawa

Timur, 19.2%; DKI Jakarta 19.1%; Sumut 17.8%; Jambi 14.1% dan Banten 13.4%.

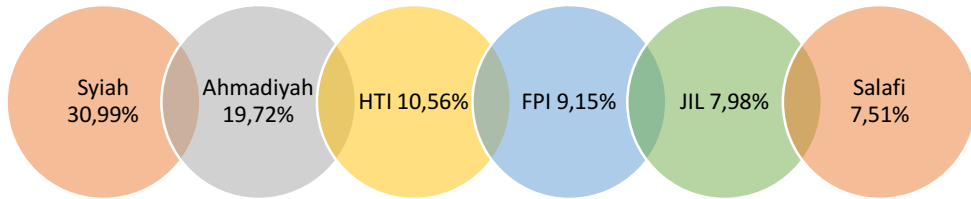
Fakta ini cukup menggembirakan karena NU dan Muhammadiyah yang mewakili kalangan Islam moderat ternyata masih dirasa dekat oleh para siswa dan mahasiswa saat ini. Selain itu dukungan terhadap HTI, ormas yang dikenal mempropagandakan khilafah untuk mengganti negara bangsa dan demokrasi, ternyata mendapat dukungan yang relatif kecil. Data ini sejalan dengan salah satu temuan utama penelitian ini, bahwa loyalitas terhadap NKRI dan demokrasi sangat tinggi.

Adapun lima ormas Islam yang dinyatakan paling dekat oleh siswa adalah NU, 40,08%; Muhammadiyah, 22,92%; Front Pembela Islam (FPI), 9,31%; Majelis Tafsir Al-Quran (MTA), 6,62%; dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), 6,19%. Sementara itu kelompok Islam yang paling tidak disukai adalah Syiah (30,99%) dan Ahmadiyah (19,72%). Data tersebut juga sesuai dengan hasil penelitian yang menyatakan sikap radikalisme dan intoleransi siswa dipengaruhi oleh persepsi negatif mereka terhadap Syiah dan Ahmadiyah. Keduanya dianggap sebagai kelompok yang menyimpang dan sesat dari ajaran Islam.

Gambar 5. Lima ormas teratas pilihan siswa.



Gambar 6. Kelompok, paham atau ormas Islam yang tidak disukai



Selanjutnya, siswa dan mahasiswa yang berafiliasi dengan ormas keagamaan cenderung memiliki sikap keagamaan yang radikal, sedangkan pada level aksi mereka cenderung moderat. Jika dilihat lebih jauh, mereka yang merasa dekat dengan FPI memiliki sikap paling radikal (67,6%) dan tingkat aksi radikal yang juga tinggi (9,2%), di bawah MTA (10,6%)(tabel 10). Selanjutnya, walaupun secara sikap mereka cenderung radikal (rata-rata di atas 50%), mereka yang merasa dekat dengan ormas *mainstream*, NU (53,8%) dan Muhammadiyah (56,1%), cenderung lebih moderat daripada mereka yang dekat dengan ormas pro-Khilafah seperti FPI dan MTA. Selain itu, mereka yang merasa dekat dengan NU dan Muhammadiyah juga adalah kelompok siswa dan mahasiswa yang paling moderat jika dibandingkan dengan mereka yang dekat dengan FPI, MTA, dan LDII.

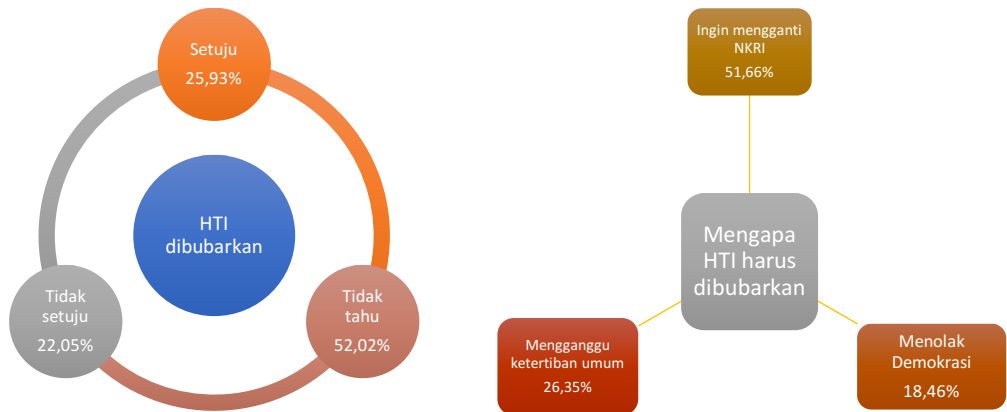
Tabel 10. Kedekatan dengan ormas terhadap tingkat radikalisme dan intoleransi

Organisasi yang Paling Dekat		RADOP (%)				RADAC (%)			
		Radikal	Netral	Moderat	<i>P-Value</i>	Radikal	Netral	Moderat	<i>P-Value</i>
Siswa/ Mahasiswa	NU	53.8	20.9	25.2	0.00	4.8	16.9	78.3	0.00
	Muhammadiyah	56.1	21.8	22.1	5.52	7.3	19	73.3	1.47
	FPI	67.6	18.5	13.9	0.46	9.2	21.4	69.4	0.98
	MTA	60.2	26	13.8	1.85	10.6	23.6	65.9	0.02
	LDII	62.6	21.7	15.7	5.27	7.8	24.3	67.8	3.86

Dukungan terhadap pembubaran HTI. Sebanyak 25,93% siswa dan mahasiswa menyatakan setuju jika HTI dibubarkan, dan 22.05% tidak setuju. Namun mayoritas (52.02%) menyatakan tidak tahu isu ini. Mereka yang setuju dengan pembubaran HTI beralasan karena HTI

ingin mengganti NKRI menjadi Khilafah (51.66%); HTI mengganggu ketertiban umum (26.35%); dan HTI menolak demokrasi (18.46%).

Gambar 7. Dukungan dan alasan terhadap pembubaran HTI



Jika dihubungkan pengaruh pembubaran terhadap HTI dengan tingkat radikalisme, data memperlihatkan bahwa mereka yang tidak setuju dengan pembubaran HTI memiliki pandangan keagamaan cenderung lebih radikal (65.6%). Namun pada level perilaku, baik yang setuju maupun tidak, memiliki perilaku keagamaan yang cenderung moderat, sebesar 68.5%.

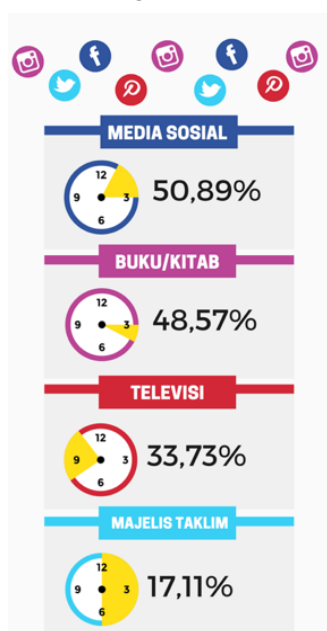
Tabel 11. Sikap terhadap pembubaran HTI dengan tingkat radikalisme dan intoleransi

Sikap Terhadap Pembubaran HTI	RADOP (%)				RADAC (%)			
	Radikal	Netral	Moderat	<i>P-Value</i>	Radikal	Netral	Moderat	<i>P-Value</i>
Setuju	53.7	20.7	25.5	0.00	10.6	21	68.5	0.00
Tidak Setuju	65.6	20.5	25.5	0.00	9.8	22	68.3	0.00
Tidak Tahu	57.9	22	25.5	0.00	40	16.3	79.6	0.00

Internet dan Media Sosial

Temuan survei ini menunjukkan bahwa siswa dan mahasiswa paling banyak mengakses internet, terutama media sosial, sebagai sumber pengetahuan agama, yaitu sebanyak 50,89%. Sumber lain yang menjadi rujukan mereka adalah buku atau kitab (48,57%) dan televisi (33,73%).

Gambar 8.
Sumber rujukan utama dalam mencari pengetahuan Keagamaan



Tampak bahwa menghadiri pengajian tidak menjadi pilihan utama mereka dalam memperoleh pengetahuan agama. Hanya 17,11% dari mereka yang menjadikan pengajian sebagai sumber rujukan. Proporsi yang paling rendah adalah liqa', sebesar 2,69%.

Efisiensi merupakan pertimbangan utama mengapa internet dan media sosial menjadi sumber rujukan utama bagi siswa dan mahasiswa. Mereka bisa menggunakan perangkat seluler di mana saja dan kapan saja secara fleksibel dalam mencari informasi terkait persoalan-persoalan agama. Kemudahan akses teknologi dan posisi mereka

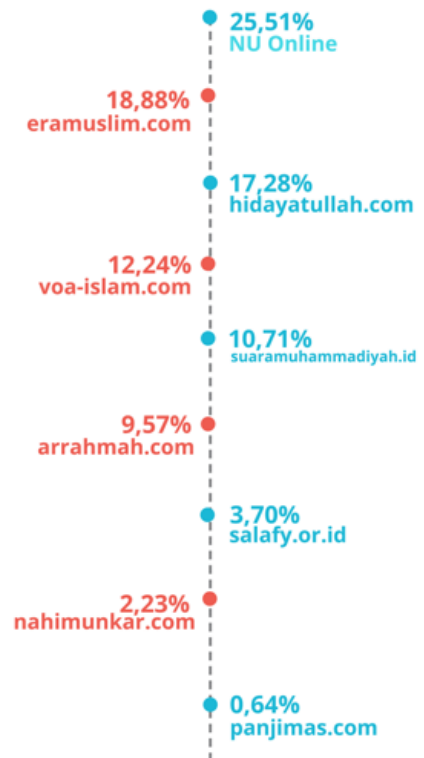
sebagai *digital native* (generasi yang lahir dimulai tahun 1990) memungkinkan mereka tidak lepas dari koneksi internet dalam keseharian, termasuk untuk memperoleh pengetahuan agama. Data survei ini pun mengkonfirmasi bahwa sebanyak 84,94% siswa dan mahasiswa memiliki koneksi internet. Dari jumlah itu, mereka yang-

memiliki akses internet di telepon seluler sebesar 96.20%. Inilah alasan mengapa sumber pengetahuan agama di internet, umumnya melalui ustadz dan website, menggeser otoritas tradisional ulama yang masih menggunakan cara-cara konvensional seperti melalui majelis taklim.

Sayangnya, situs-situs yang populer dan banyak diakses oleh siswa dan mahasiswa adalah yang bisa dikategorikan radikal. Walaupun nu.online, sebagai representasi ormas Islam *mainstream* dan moderat, paling banyak diakses (25,51%), tapi beberapa situs yang kerap menyajikan pesan-pesan radikal juga populer di kalangan mereka. Beberapa di antaranya seperti eramuslim.com (18,88%), hidayatullah.com (17,28%), voa-islam.com (12,24%), arrahmah.com (9,57%), salafy.or.id (3,70%), nahimunkar.com (2,23%), dan panjimas.com (0,64). Bahkan suaramuhammadiyah.com popularitasnya masih bawah eramuslim.com, hidayatullah.com, dan voa-islam.com, yang hanya sebesar 10,71%.

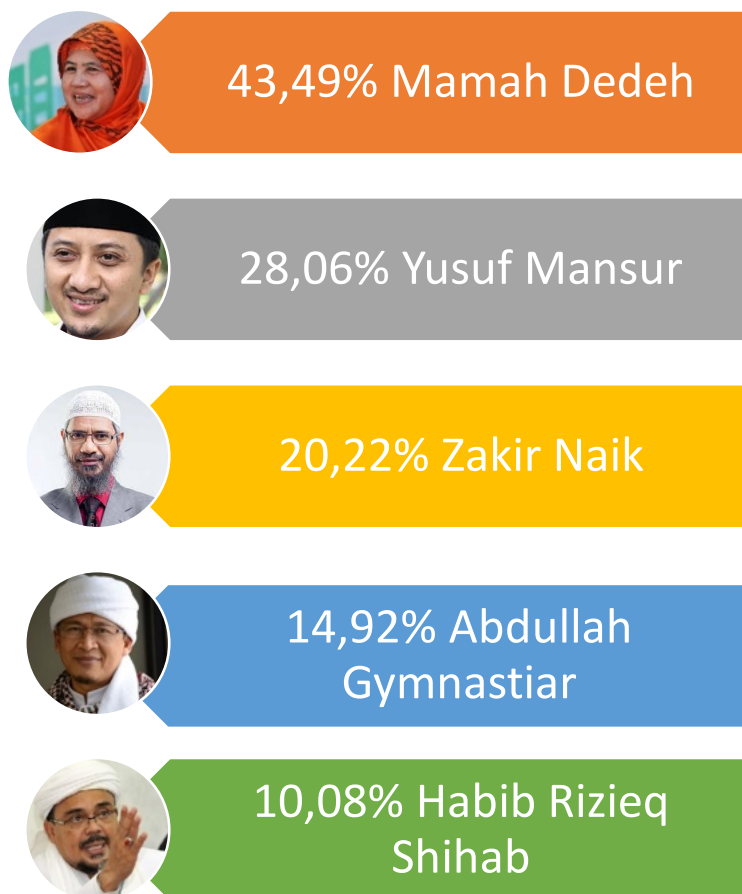
Perkara situs yang diblokir oleh pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi persoalan pro dan kontra. Pendapat yang pro menyatakan bahwa situs-situs tersebut telah menyebarkan pesan negatif di media online yang berujung mengajak pada tindakan teror. Sedangkan yang kontra bersandar pada kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh konstitusi. Hingga kini masih ada perdebatan di kalangan akademisi, praktisi, aktivis dan pemerintah akan masalah pemblokiran ini.

Gambar 9.
Situs yang paling banyak diakses sebagai sumber mendapatkan pengetahuan agama



Studi ini juga mengamati kecenderungan siswa dan mahasiswa dalam melihat penceramah agama di internet. Penceramah agama yang paling sering dilihat adalah Mamah Dedeh (43,49%), Yusuf Mansur (28,06%), Zakir Naik (20,22%), Abdullah Gymnastiar (14,92%), dan Habib Rizieq Shihab (10,08%). Cukup disayangkan bahwa ustadz-ustadz yang terkenal moderat dan mengajarkan keberagaman, seperti Quraish Syihab, Mustafa Bisri dan Ahmad Syafii Ma'arif, tidak masuk radar siswa dan mahasiswa yang mengakses internet. Sementara ustadz-ustadz yang kerap menyampaikan materi kebencian dan prasangka buruk terhadap non-Muslim cukup populer, seperti Zakir Naik dan Habib Rizieq Shihab.

Gambar 10. Penceramah agama yang menjadi rujukan di internet dan media sosial.



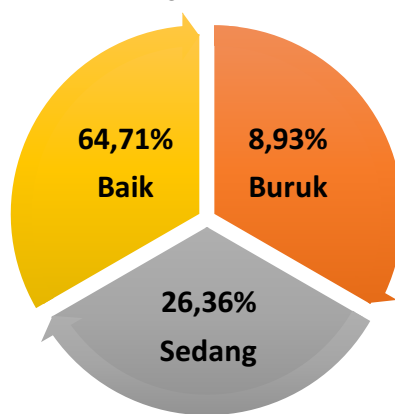
Terakhir, terdapat hubungan yang signifikan antara akses internet dengan sikap radikalisme. Sebanyak 59,5% siswa dan mahasiswa yang memiliki akses internet memiliki sikap keberagamaan yang radikal dan sangat radikal. Namun pada level aksi, mereka yang memiliki akses internet cenderung sangat moderat. Hanya sebesar 7,3% dari mereka yang memiliki perilaku radikal. Fakta ini membuktikan bahwa internet sangat berpengaruh bagi pembentukan pemahaman keagamaan siswa dan mahasiswa. Sayangnya ruang-ruang maya tersebut banyak diambil alih oleh kalangan radikal. Sementara ormas Islam dan tokoh Islam yang moderat dan *mainstream* ternyata belum maksimal memanfaatkan ruang internet dalam menebar nilai-nilai Islam yang damai, toleransi dan keberagamaan.

Persepsi terhadap Kinerja Pemerintah dan Demokrasi

Kinerja pemerintah. Keterlibatan seseorang dalam aksi radikal dan bergabung dengan organisasi ekstremis dipengaruhi oleh sejumlah kondisi struktural. Seseorang merasa mendapat ketidakadilan dari kondisi sosial dan ekonomi yang dia hadapi. Kondisi ini biasa disebut sebagai deprivasi relatif (*relative deprivation*), atau perasaan menjadi korban atas kondisi sosial-ekonomi tertentu. Lemahnya performa pemerintah (*ungoverned governance*) dan lemahnya penegakan hukum dalam mengelola urusan publik juga menjembatani seseorang untuk bersikap dan berperilaku radikal. Di negara-negara dengan kondisi struktural tersebut, terutama di negara-negara MENA (*Middle East and North Afrika*), banyak terjadi aksi-aksi kekerasan, teror dan radikalisme. Selain itu, di negara-negara tersebut juga subur gerakan-gerakan ekstremisme kekerasan, termasuk di dalamnya gerakan terorisme berbasis agama.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, persepsi Muslim terhadap performa pemerintah berpengaruh terhadap hubungan antara agama dan negara. Lebih jauh hal itu juga akan mempengaruhi kondisi sosial politik domestik negara. Perasaan keterwakilan dalam setiap kebijakan pemerintah menjadi isu penting dalam konteks ini. Bagaimana persepsi siswa dan mahasiswa terhadap kinerja pemerintah dalam bidang ekonomi dan hukum, dan bagaimana korelasinya terhadap tingkat radikalisme mereka menjadi krusial untuk digali.

Gambar 11. Persepsi tentang kebijakan pemerintah terkait kepentingan umat Islam



Temuan survei menunjukkan bahwa mayoritas siswa dan mahasiswa menilai positif kebijakan pemerintah terkait kepentingan umat Islam. Kurang dari 10% yang merasa bahwa kebijakan terhadap umat Islam buruk. Kondisi ini menghindarkan mereka dari perasaan teralienasi, yang dapat mengantarkan mereka kepada perasaan deprivasi relatif serta sikap dan perilaku radikal. Persepsi terwakili oleh kebijakan pemerintah sejatinya dapat memperkuat budaya kewargaan (*civic culture*) dan demokrasi, karena mereka percaya kepada pemerintah dan sistem negara saat ini.²⁴

Walaupun secara umum kinerja pemerintah dinilai baik terhadap umat Islam, namun aspek penegakan hukum dan ekonomi cenderung negatif. Sebanyak 69,79% menyatakan bahwa penegakkan hukum di Indonesia masih tidak adil. Oleh karena itu, pembenahan dalam sektor hukum harus menjadi fokus utama pemerintah. Karena jika generasi muda tidak percaya terhadap penegakan hukum, maka dikhawatirkan mereka akan mencari alternatif hukum lain yang mereka lebih percaya. Kecenderungannya adalah mereka akan lebih percaya kepada hukum agama—syariat Islam—sebagai sumber hukum yang harus diterapkan.

Begitu juga evaluasi mereka terhadap kondisi ekonomi. Mayoritas mereka menyatakan bahwa kondisi ekonomi saat ini tidak cukup ideal. Sebanyak 76,60% menyatakan kondisi perekonomian saat ini

²⁴ Lihat Gabriel Almond and Sidney Verba (1963). "The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations." Princeton: Princeton University Press.

kurang bagus hingga sangat buruk. Persepsi yang sama juga ditemukan terkait kesenjangan ekonomi. Sebanyak 52,28% menyatakan bahwa kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan miskin saat ini buruk. Temuan survei ini juga mengkonfirmasi bahwa ada hubungan yang signifikan antara ketidakpuasan ekonomi dengan tingkat sikap toleransi eksternal maupun internal.

Belum maksimalnya kinerja pemerintah dalam sektor penegakan hukum dan ekonomi, dalam persepsi siswa dan mahasiswa, menjadi peringatan untuk membenahi kedua sektor ini. Studi telah menunjukkan ada keterkaitan antara persepsi ketidakadilan ekonomi dengan potensi radikalisme dan terorisme.²⁵ Demikian juga rendahnya *good governance* dalam bidang politik dan penegakan hukum dinilai berkontribusi melahirkan kekerasan dan terorisme.²⁶ Jika persepsi akan ketidakadilan ekonomi dan hukum bertemu dengan ideologi radikal—seperti jihad, *thaghut*, khilafah dan syahid, maka di situlah seorang akan rentan masuk kepada paham dan gerakan radikal.

Dukungan dan kepuasan terhadap demokrasi. Penilaian siswa dan mahasiswa terhadap demokrasi sangat tinggi. Sebanyak 85,10% menyatakan bahwa demokrasi adalah sistem politik terbaik. Hanya 8,18% yang menganggap demokrasi sebagai sistem yang buruk. Data ini menunjukkan optimisme bahwa keberlangsungan demokrasi di Indonesia akan berlangsung dan terkonsolidasi. Dalam teori demokrasi, jika dukungan terhadap demokrasi lebih dari 70%, maka ini menunjukkan indikator stabilitas demokrasi.²⁷

Namun terjadi penurunan persentase tingkat kepuasan terhadap demokrasi jika dibandingkan dengan dukungan mereka terhadap sistem politik ini. Meski demikian, mayoritas masih tetap merasa puas dengan pelaksanaan demokrasi (64,02%). Ketidakpuasan terhadap demokrasi yang mencapai 35,98% dapat diakibatkan oleh masih belum maksimalnya kinerja aktor-aktor dan institusi-institusi politik terutama partai politik, politisi, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Beberapa lembaga survei juga telah mengkonfirmasi bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik dan DPR sangat rendah.

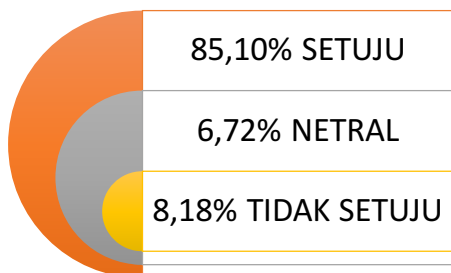
²⁵ Lihat Ted Robert Gurr, "Economic Factors" dalam, Louis Richardson (2006). "The Roots of Terrorism." London and New York: Routledge.

²⁶ Lihat Alan B. Krueger (2007) "What Makes a Terrorist: Economic and the Roots of Terrorism." Princeton: Princeton University Press.

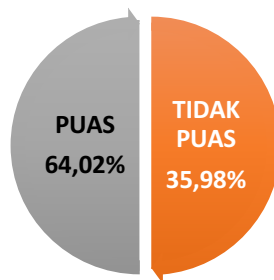
²⁷ Lihat Larry Diamond (1999). "Developing Democracy: Toward Consolidation." Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.

Kasus korupsi menjadi salah satu faktor dominan yang memicu kekecewaan publik terhadap mereka.

Gambar 12. Dukungan terhadap demokrasi



Gambar 13. Kepuasan terhadap pelaksanaan demokrasi



Islamisme

Temuan ini juga menjelaskan adanya kerancuan dalam sikap keberagaman siswa dan mahasiswa perihal beberapa tema dalam Islamisme. Walaupun loyalitas mereka terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI dan demokrasi sangat kuat, namun aspirasi mereka terhadap penerapan syariat Islam juga tinggi.

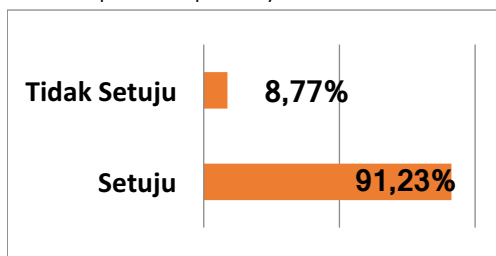
Penerapan Syariat Islam oleh Pemerintah. Siswa dan mahasiswa mendukung pemerintah menerapkan syariat Islam. Mayoritas (91,23%) menyatakan setuju dengan penerapan syariat Islam. Temuan ini penting karena pada saat yang sama loyalitas mereka terhadap NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan demokrasi juga sangat kuat. Penting untuk menjelaskan anomali ini. Interpretasi mereka tentang syariat Islam juga perlu diperdalam. Artinya, sejauh mana syariat Islam dapat diimplementasikan dalam kehidupan bernegara. Dari sini kita dapat meletakkan perkara penerapan syariat Islam bukan pada level konstitusi, tapi pada level urusan hukum di bawahnya seperti hukum pidana, perdata, dan aturan bernuansa agama yang banyak berkembang di level pemerintah daerah.

Aspirasi mereka terhadap penerapan syariat Islam terutama dipengaruhi oleh menguatnya gerakan Islamisme di Indonesia setelah reformasi tahun 1998. Dengan terbukanya struktur kesempatan politik (*political opportunity structure*) dalam sistem demokrasi, gerakan ini

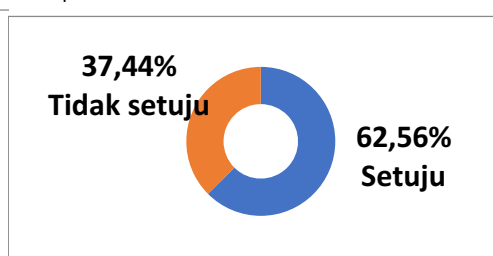
gencar mendesak penerapan syariat Islam. Ruang keterbukaan yang mereka manfaatkan itu sejalan dengan dilaksanakannya desentralisasi dan otonomi daerah. Mereka menjadi lebih gencar menjadikan penerapan syariat Islam sebagai isu publik.

Hasil temuan survei ini juga mengkonfirmasi bahwa gerakan-gerakan Islamisme ini populer di kalangan siswa dan mahasiswa seperti FPI dan MTA. Selain itu, gerakan Islamisme ini juga tumbuh subur di beberapa daerah dalam bentuk organisasi keislaman garis keras, seperti Gerakan Reformis Islam (Garis) di Cianjur, Front Pemuda Islam (FPI) di Solo, Brigade Tholiban Tasikmalaya, Laskar Jundullah di Makassar, Aliansi Nasional Anti Syiah (ANAS), serta beberapa organisasi radikal lainnya.

Gambar 14. Dukungan terhadap penerapan syariat Islam



Gambar 15. Hukum Islam bagi pelaku zina adalah dicambuk



Dukungan yang kuat juga tampak jika dilihat lebih spesifik melalui tema-tema pelaksanaan syariat Islam. Misalnya ketika ditanya pandangan mereka terhadap hukum cambuk, sebanyak 62,56% menyatakan setuju bahwa hukum Islam bagi pelaku zina adalah cambuk. Penerapan syariat di Aceh bisa menjadi salah satu rujukan bagi siswa dan mahasiswa. Walaupun mereka juga belum tentu paham bagaimana pelaksanaannya di sana.²⁸

Oleh karena itu penting bagi pendidikan agama menyajikan tentang penafsiran yang fleksibel dan kontekstual antara hukum Islam, hukum nasional, dan kondisi pluralitas sosial. Ormas Islam moderat juga

²⁸ Pada tahun-tahun awal reformasi, pemerintah telah mengakomodasi aspirasi untuk berlakunya regulasi khusus bagi Provinsi Aceh melalui pengesahan UU No. 18 Tahun 2001 yang memberi kewenangan Aceh untuk menerapkan hukum Islam. Meski mendapatkan banyak kritik karena dianggap berdampak kepada pelanggaran hak asasi manusia, tetapi hingga kini masih berjalan. Salah satu yang paling kontroversial menyangkut qanun jinayah. Hingga 2016 Mahkamah Syariah Aceh telah memberlakukan hukuman cambuk 180 orang yang divonis melanggar qanun jinayah ini.

penting untuk kembali memperkuat *khittahnya*, yaitu kembali mengurus pendidikan jamaahnya yang sesuai dengan konteks keindonesiaan.

Khilafah. Seperti telah dijelaskan, demokrasi memungkinkan menguatnya identitas kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Di Indonesia, negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, beberapa kelompok Islam radikal juga berusaha mempengaruhi publik dengan ide-ide Islamis seperti khilafah, hukum Islam dan jihad. Bahkan mereka juga mempropagandakan ide-ide itu sebagai alternatif untuk mengganti konsep dasar-dasar negara Indonesia.

Salah satu di antara gerakan Islamis yang paling gencar menyuarakan khilafah dan syariat Islam adalah HTI. Mereka menjadikan pemuda, khususnya di sekolah dan kampus, sebagai sasaran propaganda ide dan cita-cita mereka. Maka tidak mengherankan jika perkembangan gerakan HTI di beberapa sekolah dan kampus semakin kuat. Merespons kekhawatiran ini, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 sebagai dasar pembubaran HTI.²⁹

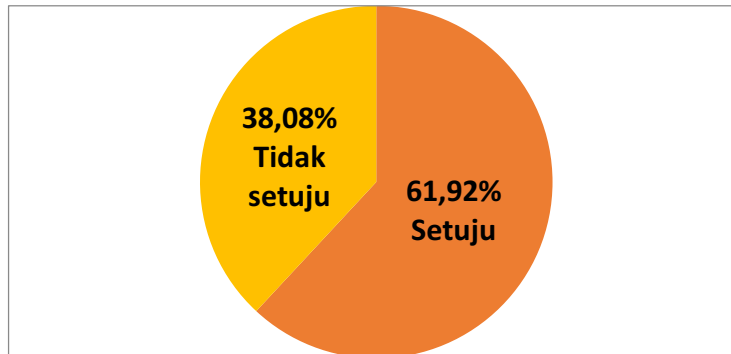
Temuan survei memberi gambaran bahwa khilafah dipersepsi sebagai sistem pemerintahan Islam. Penting untuk dicatat, apakah konsep khilafah yang dimaksud siswa dan mahasiswa adalah model yang dicita-citakan oleh HTI atau hanya bersifat normatif atau umum. Berdasarkan temuan sebelumnya, ada kecenderungan mereka tidak menyukai HTI (25,93%) karena HTI dianggap ingin mengganti NKRI dan anti demokrasi. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa penerimaan terhadap konsep khilafah lebih karena dianggap sebagai bagian dari ajaran Islam, bukan khilafah yang dicita-citakan HTI.

Sebanyak 61,92% menganggap bahwa khilafah adalah sistem pemerintahan Islam. Sisanya 38,08% tidak setuju jika khilafah adalah sistem pemerintahan Islam. Tentu persetujuan mereka terhadap konsep khilafah bisa menjadi potensi buruk jika bertemu dengan ide-ide khilafah versi HTI. Untuk itu, pendidikan agama Islam harus menjadi benteng dalam memberikan pemahaman yang benar tentang khilafah dalam konteks negara bangsa. Selain itu penguatan

²⁹ Secara nomenklatur UU tersebut tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. UU tersebut telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Selasa, 23 Oktober 2017.

wawasan kebangsaan, toleransi, dan keragaman menjadi penting disemai bukan hanya kepada siswa dan mahasiswa, namun juga kepada para guru, dosen, dan pengurus sekolah dan kampus.

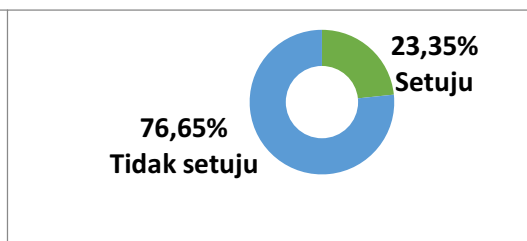
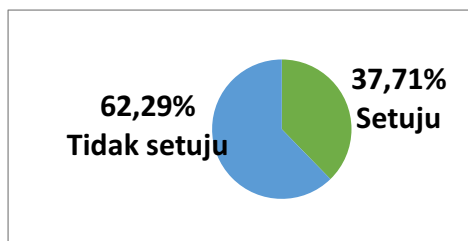
Gambar 16. Sistem khilafah adalah sistem pemerintahan Islam



Jihad. Jika dilihat respons mereka tentang jihad, ada kecenderungan mereka menolak jika jihad diasosiasikan dengan kekerasan. Misalnya, 62,29% tidak setuju dengan pernyataan yang menyatakan bahwa jihad adalah melawan non-Muslim, dan 76,65% tidak setuju bahwa bunuh diri adalah bagian dari jihad Islam. Di sini terlihat pola yang negatif terhadap konsep jihad dengan menggunakan kekerasan. Namun data tersebut masih menyisakan kekhawatiran karena mereka yang setuju jika jihad adalah melawan non-Muslim dan bahwa bunuh diri adalah jihad Islam rata-rata lebih 20%.

Gambar 17. Jihad adalah melawan non-Muslim

Gambar 18. Bunuh diri adalah jihad Islam

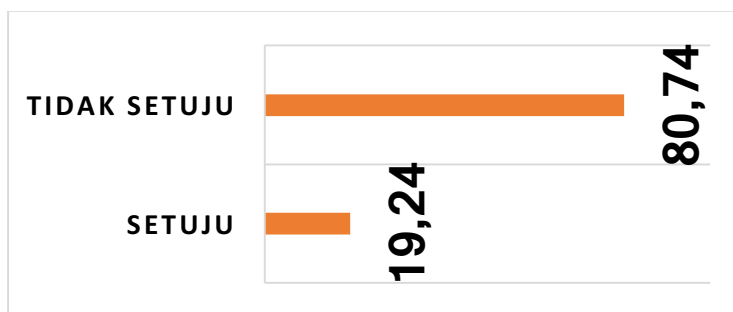


Thaghut dan kafir. Mayoritas tidak setuju jika pemerintah dianggap *thaghut* dan kafir, mencapai 80,74%, dan hanya sebanyak 19,24%

yang setuju dengan pernyataan tersebut. Pernyataan bahwa pemerintah *thaghut* adalah pernyataan khas dari kalangan jihadis. Alasan utamanya adalah karena pemerintah Indonesia dianggap tidak menerapkan sistem syariat Islam secara menyeluruh, seperti tercermin dalam konsep khilafah. Misalnya, hukum pidana yang dipakai merupakan hukum warisan kolonial buatan manusia, bukan berasal dari Tuhan. Begitu pun sistem demokrasi yang menyatakan kedaulatan di tangan rakyat dianggap tidak sejalan dengan hukum Islam. Mereka menganggap kedaulatan hanya pada Tuhan (*theocracy*), bukan pada manusia.

Sebenarnya angka 19,24% yang setuju merupakan sebuah peringatan yang menunjukkan bahwa ideologi semacam ini cukup kuat. Seseorang yang mempunyai ideologi seperti itu dapat dipastikan memiliki pandangan keagamaan yang literal dan radikal. Mereka memandang hitam-putih mana yang Islam dan anti-Islam. Sehingga ada kecenderungan kuat mereka merupakan bagian atau simpatisan kelompok ekstremis.

Gambar 19. Pemerintah Indonesia adalah *thaghut* dan kafir



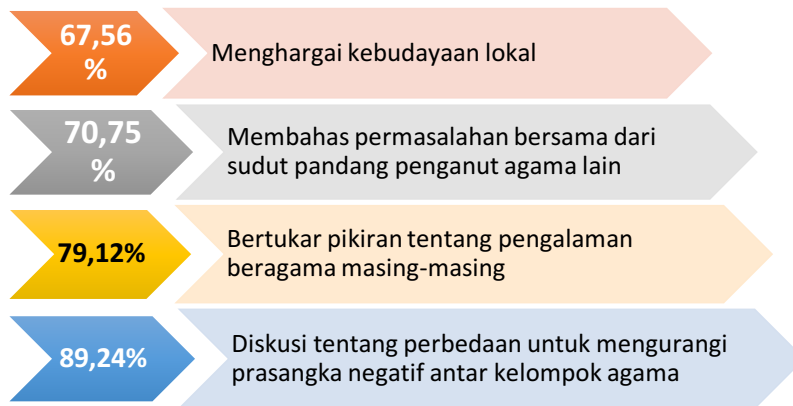
VI MODEL PENDIDIKAN YANG MENG-COUNTER INTOLERANSI DAN RADIKALISME

Di atas telah dijelaskan gambaran radikalisme dan intoleransi di kalangan siswa dan mahasiswa. Tampak ada kecenderungan mereka memiliki pandangan keagamaan yang radikal dan intoleran—kecuali untuk beberapa tema tertentu. Pendidikan agama Islam juga berkontribusi terhadap pembentukan pandangan

keagamaan demikian. Hal ini, misalnya, terjadi melalui materi yang lebih menitikberatkan pada keimanan dan ibadah ketimbang toleransi dan keberagaman, sampai pada guru yang cenderung memiliki pandangan keagamaan yang intoleran dan radikal.

Meski demikian, temuan survei ini juga memberikan beberapa peluang dalam mengembangkan model pembelajaran PAI yang dapat menumbuhkan sikap toleransi dan meredam radikalisme serta intoleransi. Mayoritas siswa dan mahasiswa setuju jika pembelajaran agama Islam memuat diskusi tentang agama lain dan menghargai kebudayaan lokal. Sebanyak 67,56% setuju jika PAI menyajikan materi yang menghargai kebudayaan lokal; 70,75% setuju jika PAI membahas permasalahan bersama dari sudut pandang penganut agama lain; 79,12% setuju jika pelajaran PAI memberi mereka kesempatan untuk bertukar pikiran tentang pengalaman beragama masing-masing; dan 89,24% setuju jika PAI memuat diskusi tentang perdebatan untuk mengurangi prasangka negatif antar kelompok negatif.

Gambar 20. Dukungan terhadap tujuan PAI tentang toleransi



Beberapa tema yang menekankan inklusifitas juga diterima baik oleh siswa dan mahasiswa. Mayoritas mereka setuju jika tujuan PAI adalah mendorong kesetaraan gender, menghargai sesama Muslim yang berbeda paham/aliran, serta berbuat baik kepada pemeluk agama lain. Jika digabungkan antara persentase yang setuju dengan yang sangat setuju, maka hampir 100% baik siswa maupun mahasiswa setuju jika tujuan PAI adalah menghargai dan berbuat baik kepada sesama Muslim yang berbeda aliran/paham.

Rata-rata 81,95% setuju jika tujuan Pendidikan Agama Islam dapat mengembangkan pemahaman tentang kesetaraan gender. Selain itu, mereka setuju bahwa tujuan pendidikan agama Islam adalah mengajarkan mereka untuk berbuat baik kepada penganut agama lain.

Data ini menunjukkan bahwa materi dan model pengajaran PAI yang menekankan pada penguatan nilai-nilai toleransi dan keberagaman diidamkan oleh siswa dan mahasiswa. Untuk itu, data ini bisa menjadi bahan bagi Kemenag, Kemendikbud, dan Kemenristek Dikti untuk mengembangkan materi dan model Pendidikan Agama Islam yang mengakomodasi nilai-nilai tersebut. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah bagaimana menyajikan materi dan pembelajaran PAI yang berorientasi pada penanaman nilai-nilai toleransi dan keberagaman tersebut dengan menarik dan tidak membosankan.

VI KESIMPULAN

Hasil survei ini memperlihatkan bahwa radikalisme dan intoleransi sedang mengancam generasi muda Indonesia. Walaupun perilaku mereka cenderung moderat, namun dari sisi sikap mereka sebagian besar radikal. Selain itu, pada aspek toleransi internal, mereka cenderung memiliki pandangan keagamaan yang intoleran. Kondisi tersebut sangat berbahaya karena sikap yang radikal dan intoleran tersebut bisa menjadi jembatan bagi lahirnya perilaku radikal dan intoleran. Kebencian sebagian besar siswa dan mahasiswa terhadap minoritas keagamaan seperti Ahmadiyah dan Syiah menjadi bukti bahwa radikalisme dan intoleransi telah tersemai di dalam institusi pendidikan formal kita.

Beberapa variabel penting yang diuji juga memiliki pengaruh terhadap radikalisme dan intoleransi siswa dan mahasiswa, misalnya internet dan sosial media. Sebagai generasi yang lahir di era digital, hampir dari mereka memiliki akses internet, dan teknologi tersebut sangat dominan dipakai untuk mencari sumber pengetahuan agama selain di kelas. Sayangnya, yang populer di kalangan mereka adalah situs-situs yang dikelola oleh kalangan radikal. Begitu pun dengan ustadz-ustadz yang mereka lihat di internet atau sosial media,

beberapa ustadz yang dinilai sering menyebarkan ujaran kebencian dan paham radikal juga cenderung populer di kalangan mereka.

Semua pihak—baik negara, ormas Islam *mainstream*, lembaga riset, maupun —harus secara serius menangani masalah ini. Ormas Islam *mainstream* bisa lebih aktif menyebarkan pesan-pesan toleransi dan kedamaian melalui media-media yang bisa diterima oleh generasi milenial. Karena pada kenyataannya ruang digital dalam beberapa hal banyak dikuasi oleh kalangan radikal. Selain itu, negara dalam hal ini Kemenag, Kemendikbud, dan Kemenristek Dikti, diharapkan membuat reformasi mengenai pembelajaran PAI, mulai dari rekrutmen guru, menambah porsi toleransi dalam materi dan pembelajaran PAI, serta melakukan penetrasi dalam melakukan pengawasan terhadap ekstrakurikuler keagamaan yang dinilai menjadi pintu masuk radikalisme di sekolah.

PROFIL PENULIS

Rangga Eka Saputra adalah peneliti muda Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia menyelesaikan pendidikan tingginya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (FISIP UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Jurusan Ilmu Politik pada tahun 2014. Sebelum bergabung di PPIM UIN Jakarta, Rangga pernah menjadi peserta program *internship* di Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina pada 2014. Pada tahun 2017, Dia dipilih untuk mengikuti *Certificate Training Program "Religion and the Rule of Law in Indonesia and Southeast Asia"* yang diselenggarakan oleh kerja sama Leimena Institute, Internasional Global Engagement (IGE), dan Brigham Young University. Di PPIM, Rangga telah terlibat dalam beberapa penelitian terkait pendidikan agama seperti: *Diseminasi Paham Eksklusif dalam Pendidikan Islam: Telaah Kebijakan dan Politik Produksi Bahan Ajar PAI (2016)* dan *Guru Agama, Toleransi, dan Isu-Isu Kehidupan Keagamaan Kontemporer di Indonesia (2016)*.

PROFIL LEMBAGA

Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta merupakan lembaga penelitian otonom di bawah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. PPIM UIN Jakarta didirikan pada tahun 1994 dan secara berkesinambungan melakukan penelitian, advokasi dan publikasi dalam isu-isu kehidupan dan pendidikan keagamaan di Indonesia. Bersama UNDP Indonesia, PPIM UIN Jakarta sejak tahun 2017 melakukan program *Countering Violent Extremism for Youth (CONVEY) Indonesia*, sebuah program yang bertujuan membangun perdamaian di Indonesia berbasis pada potensi pendidikan agama dengan menyentuh isu-isu toleransi, kebhinnekaan dan kekerasan di kalangan generasi muda. Selain itu, sejak berdirinya sampai saat ini, PPIM UIN Jakarta juga menerbitkan Jurnal ***Studia Islamika***, sebuah jurnal bereputasi internasional yang berfokus pada kajian Islam di Indonesia dan Asia Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, dan Dokumen

- Almond, Gabriel and Sidney Verba (1963). "The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations." Princeton: Princeton University Press.
- Anderson, James dan Ian Shuttleworth (1998). "Sectarian Demography, Territoriality and Political Development in Northern Ireland." *Political Geography*, Vol. 17, No. 2, pp. 187-208, 1998.
- Azra, Azyumardi, Dina Afrianty, dan Robert W. Hefner (2010). "Pesantren and Madrasa: Muslim Schools and National Ideals in Indonesia" dalam Robert W. Hefner & Muhammad Qasim Zaman (edt.) "Schooling Islam: The Culture and Politics of Modern Muslim Education". Princeton: Princeton University Press.
- Bartlett Jamie, Jonathan Birdwell, & Michael King (2010). "The Edge of Violence: a Radical Approach to Extremism." London: Demos.
- Bano Masooda, Didin Syafruddin, Azyumardi Azra, Abuddin Nata, Rusydy Zakaria, dan Suparto Sunoko (2016). "Study on Islamic Religious Education in Secondary Schools in Indonesia." Jakarta: Directorate of Islamic Education Ministry of Religious Affair, Republic of Indonesia (Kemenag RI).
- Bruinessen, Martin van (2008). "Traditionalist and Islamist Pesantrens in Contemporary Indonesia" dalam Farish A. Noor, Yoginder Sikand & Martin van Bruinessen "The Madrasa in Asia: Political Activism and Transnational Linkages." Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Bryner, Karen (2013). "Piety Projects: Islamic Schools for Indonesia's Urban Middle Class". Dissertation: Columbia University.
- Diamond, Larry (1999). "Developing Democracy: Toward Consolidation." Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.
- Elihami (2016). "The Challenge of Religious Education in Indonesia Multiculturalism." *Journal of Education and Human Development* Vol. 5, No.4, pp.211-221.

- Esteban J, & Ray, D. (2011). "A model of ethnic conflict." *Journal of the European Economic Association*, 9(3), 496-521
- Feith, Herbert & Lance Castles (1988). "Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965." Jakarta: LP3ES.
- Fuller, Graham E. (2004) "The Youth Crisis in Middle Eastern Society", Michigan: Institute for Social Policy and Understanding.
- Gurr, Ted Robert. "Economic Factors" dalam, Louis Richardson (2006). "The Roots of Terrorism." London and New York: Routledge.
- Hasan, Noorhaidi (2008). "The Salafi Madrasas of Indonesia" dalam Farish A. Noor, Yoginder Sikand & Martin van Bruinessen "The Madrasa in Asia: Political Activism and Transnational Linkages." Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Hefner, Robert W (2009). "Islamic Schools, Social Movement, and Democracy in Indonesia" dalam Robert W. Hefner (edt.) "Making Modern Muslim: The Politics of Islamic Education in Southeast Asia". Honolulu: University of Hawai'i Press.
- Alan B. Krueger (2007) "What Makes a Terrorist: Economic and the Roots of Terrorism." Princeton: Princeton University Press.
- Kusmanto, Thohir Yuli, Moh. Fauzi dan M. Mukhsin Jamil (2015). "Dialektika Radikalisme dan Anti Radikalisme di Pesantren." *Walisongo, Volume 23, Nomor 1, Mei 2015*.
- Lukens-Bull, Ronald A (2013). "Islamic Higher Education in Indonesia: Continuity and Conflict." New York: Palgrave MacMillan.
- Lundberg, George A (1927). "The Demographic and Economic Basis of Political Radicalism and Conservatism." *American Journal of Sociology, Vol. 32, No.5 (Mar., 192), pp. 719-732*.
- Makruf, Jamhari (2014). "Incubator for Extremism? Radicalism and Moderation in Indonesia's Islamic Education System." Policy Paper: Centre for Indonesian Law, Islam and Society (CILIS).
- Maksum, Ali (2015). "Model Pendidikan Toleransi di Pesantren Modern dan Salat", *Jurnal Pendidikan Agama Islam, Volume 03, Nomor 1, Mei 2015, Hal 82- 108*.
- McCauley, Clark dan Sophia Moskalenko (2017). "Understanding Political Radicalization: The Two-Pyramids Model." *American Psychological Association, Vol. 72, No.3, pp. 2015-216*.

- Menchik Jeremy (2017). "Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance without Liberalism." New York: Cambridge University Press.
- Mubarak, M. Zaki (2013). "Dari Semangat Islam Menuju Sikap Radikal: Pemikiran dan Perilaku Keagamaan Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta." *Ma'arif* Vol.8, No. 1-Juli 2013.
- Mursalim, Ayub dan Ibnu Katsir (2010). "Pola Pendidikan Keagamaan Pesantren dan Radikalisme: Studi Kasus Pesantren-Pesantren di Provinsi Jambi", *Kontekstualika*, Vol. 25, No.2, 2010.
- Piazza, James A (2006) "Rooted in Poverty?: Terrorism, Poor Economic Development, and Social Cleavages , Terrorism and Political Violence, 18:1, 159-177.
- Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2016). "Diseminasi Paham Eksklusif dalam Pendidikan Islam: Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah." Laporan Hasil Penelitian
- Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2016). "Guru Agama, Toleransi, dan Isu-Isu Kehidupan Keagamaan Kontemporer di Indonesia." Laporan Hasil Penelitian.
- Ropi, Ismatu (2017). "Religion and Regulation in Indonesia." Singapore: Springer.
- Richards A (2003). "Socio-Economic roots of Radicalism? Towards explaining the appeal of Islamic Radicals." DIANE Publishing.
- Salim HS, Hairus, Najib Kailani, dan Nikmal Azekiyah (2011). "Politik Ruang Publik Sekolah: Negosiasi dan Resistensi di SMUN di Yogyakarta." Yogyakarta: Centre for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS) UGM.
- Silber, Mitchell D. & Arvin Bhatt (2007). "Radicalization in the West: The Homground Threat," dalam McCauley, C., & Moskalenko, S. (2017). "Understanding political radicalization: The two-pyramids model." *American Psychologist*, 72(3), 205.
- Smith, Bianca J, dan Mark Woodward (edt.) (2014). "Gender and Power in Indonesian Islam: Leaders, Feminists, Sufis and Pesantren Selves." New York: Routledge.
- Solahudin, Dindin (2008). "The Workshop for Morality: The Islamic

Creativity of Pesantren Daarut Tauhid in Bandung, Java." Canberra: ANU E Press.

Stevenson, Paul (1977). "Frustration, Structural Blame, and Leftwing Radicalism." *The Canadian Journal of Sociology/Cahiers canadiens de sociologie*, Vol.2, No.4 (Autumn, 1977), pp. 355-372.

Tan, Charlene (2011). "Islamic Education and Indoctrination: The Case in Indonesia." New York: Routledge.

Wahid Foundation (2016). "Riset Potensi Radikalisme di Kalangan Aktivistis Rohani Islam Sekolah-Sekolah Negeri." Laporan Hasil Penelitian.

Ware, Helen (2005). "Demography, Migration and Conflict in the Pacific." *Journal of Peace Research*, Vol. 42, No.4, Special Issue on the Demography of Conflict and Violence (Jul., 2005), pp. 435-454.

Website

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia www.bkkbn.go.id/detailpost/negara-harus-siap-bonus-demografi, 22 Agustus 2016.